

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPULAUAN KUNDUR TERKENDALA MENJADI DAERAH OTONOM BARU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH

HERRYZAL

NIM: 11575105589



PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : HERRYZAL
NIM : 11575105589
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPULAUAN KUNDUR TERKENDALA
MENJADI DAERAH OTONOM BARU

Disetujui Oleh

Pembimbing



Dr. Mahmuzar, M. Hum
NIP. 19760426 200701 1 016

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Jurusan,

Administrasi Negara



Dr. Drs. H. Muh. Sa'id HM, M.Ag. MM
NIP. 19620512 198903 1 003



Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

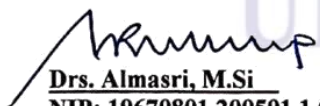
NAMA : HERRYZAL
 NIM : 11575105589
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
 KEPULAUAN KUNDUR TERKENDALA
 MENJADI DAERAH OTONOM BARU


**PANITIA PENGUJI
 KETUA PENGUJI**


Dr. Kamaruddin S.Sos, M. Si
NIP: 19790101 200710 1 003

PENGUJI I

PENGUJI II


Drs. Almasri, M.Si
NIP: 19670801 200501 1 007


Muslim, S.Sos, M.Si
NIP: 19820205 2015031 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEPULAUAN KUNDUR GAGAL
MENJADI DAERAH OTONOM BARU**

Oleh

HERRYZAL

Penyebab Gagalnya Kepulauan Kundur Menjadi Daerah Otonom Baru yaitu adanya Moratorium Daerah Otonomi Baru dari Pemerintahan Pusat Meski Kepulauan Kundur sudah dimasukkan kedalam 65 Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kelayakan Kepulauan Kundur Menjadi Daerah Otonom Baru di Kepulauan Riau serta Faktor Penyebab Kepulauan Kundur Gagal Menjadi Daerah Otonom Baru. Penelitian ini memerlukan data dari Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi yang berupa dokumen-dokumen yang telah ada. Data tersebut diperoleh melalui wawancara, dokumenter, kuesioner. Kemudian dianalisis menggunakan skala likert dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelayakan Kepulauan Kundur Menjadi Daerah Otonom Baru di Kepulauan Riau dilihat dari 3 indikator yang diantaranya Persyaratan Dasar Kewilayahan yang diantaranya luas wilayah, jumlah penduduk, batas wilayah, cakupan wilayah dan batas usia minimal daerah terpenuhi dengan Baik. Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah yang diantaranya geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah dan kemampuan penyelenggara pemerintahan terpenuhi dengan Sangat Baik dan untuk Persyaratan Administratif yang diantaranya keputusan musyawarah desa, persetujuan DPRD Kabupaten dan Bupati dan persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur. Hasil dari Kelayakan Daerah Kepulauan Kundur termasuk kedalam kategori Tinggi/Maksimal dengan nilai keseluruhan 76,14% Adapun Faktor Penyebab Kepulauan Kundur Gagal Menjadi Daerah Otonom Baru pada faktor eksternal ialah masih adanya Moratorium dari Pemerintah Pusat dan penyebab faktor internalnya ialah pada Persyaratan Administratif Daerah Kepulauan Kundur yang termasuk kedalam kategori Cukup/Kurang.

Kata Kunci : Kelayakan Daerah, Faktor Penyebab Eksternal dan Internal, dan Pemekaran Daerah Kepulauan Kundur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahirabbil'alam*in puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Kepulauan Kundur Gagal Menjadi Daerah Otonom Baru”. Skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana (SI) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, teladan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita tergolong umat-umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW, selalu mengindahkan serta uswah dan amalan Sunnahnya.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahinya itu penulis berharap kemakluman serta masukkan dari pembaca.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan Skripsi ini banyak pihak yang turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Kusnadi M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Drs. H. Promadi M.Pd selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
6. Ibu Dr. Leny Nofianti M.S, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
7. Ibu Dr. Juliana SE, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Dr. Amrul Muzan S. HI, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
9. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara yang telah banyak memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Weni Puji Hastuti S.Sos, MKP selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara yang telah banyak memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak DR. Mahmuzar, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran beliau untuk membimbing, memberikan kemudahan serta memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
12. Bapak Drs. Almasri, M.si selaku penasehat akademis (PA) yang telah mengajarkan dan memberikan arahan serta motivasi agar penulis dapat menjalani dan menyelesaikan perkuliahan program sarjana dengan baik.
13. Kepada seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis selama perkuliahan
14. Terima kasih kepada Bapak Huzrin Hood, SH selaku Penggerak Utama Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur dan Bapak Katwanto, SE sebagai anggota Tim Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah memberikan bantuan dan dukungan berupa data dan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian skripsi.

15. Terimakasih untuk orang tua saya tercinta Bapak saya yang bernama Abdul Rasyid dan Ibu saya yang bernama Halizah, Adik saya Nurbetty dan Keluarga Besar Alm. Abdul Jalil dan Keluarga Besar Alm. Namat yang telah memberikan nasehat, ilmu, doa yang tak pernah dilupakan sepanjang masa.
16. Sahabat base camp C3 yang selalu setia membantu dan mendampingi penulis dengan sabar selama masa perkuliahan hingga saat ini. Dengan ketulusan hati mengiringi perjalanan penulis, yang selalu menjadi yang terdepan untuk membantu penulis.

Pekanbaru, 27 Agustus 2019

Penulis,

HERRYZAL
NIM.11575105589

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Tujuan Otonomi Daerah.....	12
2.2 Tujuan Pemekaran Daerah Otonom Baru	19
2.3 Konsep Islam.....	26
2.4 Penelitian Terdahulu	28
2.5 Defenisi Konsep	30
2.6 Konsep Operasional	32
2.7 Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3.3 Jenis dan Sumber Data	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Populasi dan Sampel	39
3.6 Metode Analisis Data	43
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	45
4.1 Keadaan Geografis	45
4.2 Jumlah Penduduk	48
4.3 Sarana dan Prasarana.....	49
4.3.1 Sarana Pendidikan.....	49
4.3.2 Sarana Peribadatan	50
4.3.3 Sarana Kesehatan	50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
5.1 Identitas Responden	52
5.2 Persyaratan Pembentukan Daerah Otonom Baru	56
5.3 Kelayakan Kepulauan Kundur Menjadi Daerah Otonom Baru	
di Provinsi Kepulauan Riau.....	57
5.3.1 Persyaratan Dasar Kewilayahan	58
5.3.2 Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah	69
5.3.3 Persyaratan Administartif.....	113
5.4 Analisis Faktor Penyebab Kepulauan Kundur Gagal Menjadi	
Daerah Otonom Baru	125
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	132

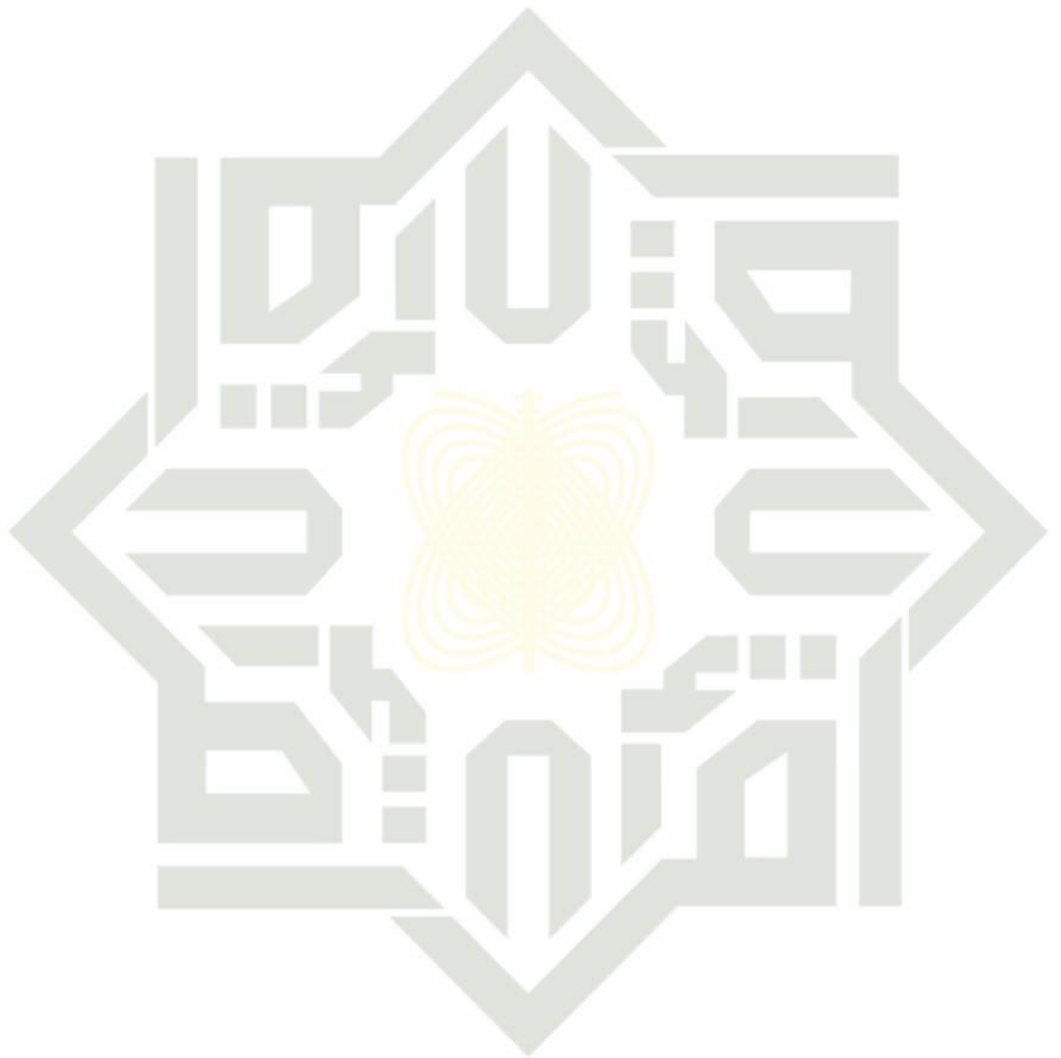


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.1 Kesimpulan.....	132
6.2 Saran.....	133

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Populasi Pemekaran Kepulauan Kundur	39
Tabel 3.2 Sampel Pemekaran Kepulauan Kundur	43
Tabel 4.1 Nama Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa	47
Tabel 4.2 Jumlah Kecamatan dan Jumlah Penduduk	48
Tabel 4.3 Jumlah Sekolah Kepulauan Kundur	49
Tabel 4.4 Sarana Peribadatan	50
Tabel 4.5 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kepulauan Kundur	51
Tabel 5.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	53
Tabel 5.2 Identitas Responden Menurut Kelompok Umur	54
Tabel 5.3 Identitas Responden Pendidikan Terakhir	54
Tabel 5.4 Identitas Responden Menurut Pekerjaan.....	55
Tabel 5.5 Tanggapan Responden Tentang Luas Wilayah Minimal Kepulauan Kundur.....	59
Tabel 5.6 Luas wilayah daratan dan Lautan perkecamatan	60
Tabel 5.7 Tanggapan Responden Tentang Jumlah Penduduk Minimal Kepulauan Kundur.....	61
Tabel 5.8 Jumlah Penduduk Kepulauan Kundur.....	61
Tabel 5.9 Tanggapan Responden Tentang Batas-batas Wilayah Kepulauan Kundur.....	62
Tabel 5.10 Tanggapan Responden Tentang Cakupan Wilayah Kepulauan Kundur.....	65
Tabel 5.11 Nama Kecamatan dan Ibukota	66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.12 Tanggapan Responden Tentang Batas Usia Minimal Daerah	
Kepulauan Kundur.....	67
Tabel 5.13 Tahun terbentuknya dan Usia kecamatan	67
Tabel 5.14 Rekapitulasi Jawaban Responden Persyaratan Dasar	
Kewilayahan Kepulauan Kundur.....	68
Tabel 5.15 Tanggapan Responden Tentang Lokasi ibukota	
Kepulauan Kundur.....	71
Tabel 5.16 Tanggapan Responden Tentang Hidrologi	
Kepulauan Kundur.....	73
Tabel 5.17 Rekap Pemakaian Air Kecamatan Kundur	73
Tabel 5.18 Tanggapan Responden Tentang Kerawanan Bencana	
Kepulauan Kundur.....	75
Tabel 5.19 Tanggapan Responden Tentang Kualitas sumber daya	
manusia Kepulauan Kundur	77
Tabel 5.20 Tanggapan Responden Tentang Distribusi Penduduk	
Kepulauan Kundur.....	77
Tabel 5.21 Distribusi dan Kepadatan Penduduk	78
Tabel 5.22 Tanggapan Responden Tentang Keamanan	
Kepulauan Kundur.....	79
Tabel 5.23 Angka Kejahatan Lingkungan Polres Karimun	79
Tabel 5.24 Tindak Pidana Umum Reskrim Polsek Kundur	80
Tabel 5.25 Tanggapan Responden Tentang Konflik Sosial	
Kepulauan Kundur.....	81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.26 Tanggapan Responden Tentang Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepulauan Kundur.....	82
Tabel 5.27 Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepulauan Kundur.....	83
Tabel 5.28 Tanggapan Responden Tentang Kohesivitas Sosial Kepulauan Kundur.....	84
Tabel 5.29 Tanggapan Responden Tentang Organisasi Masyarakat Kepulauan Kundur.....	84
Tabel 5.30 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Kepulauan Kundur.....	85
Tabel 5.31 Tanggapan Responden Tentang Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Kundur	86
Tabel 5.32 Rasio Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Kundur	87
Tabel 5.33 Tanggapan Responden Tentang Potensi Unggulan Daerah Kepulauan Kundur.....	87
Tabel 5.34 Jenis Tanaman Pangan di Kepulauan Kundur	88
Tabel 5.35 Produksi Tanaman Jenis berdasarkan luasnya	88
Tabel 5.36 Produksi Tanaman jenis buah-buahan pertahun	89
Tabel 5.37 Produksi Tanaman jenis sayur-sayuran pertahun.....	89
Tabel 5.38 Jenis Tanaman perkebunan berdasarkan luasnya	90
Tabel 5.39 Produksi Tanaman perkebunan tiap tahun	90
Tabel 5.40 Komiditi ikan unggulan di Kepulauan Kundur	91
Tabel 5.41 Produksi penangkapan dan budidaya perikanan	92
Tabel 5.42 Wisata Bahari dan Wisata Sejarah Kepulauan Kundur	92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.43 Sebaran potensi sumber daya mineral dan bahan galian.....	93
Tabel 5.44 Tanggapan Responden Tentang Kapasitas asli daerah induk.....	94
Tabel 5.45 Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun	95
Tabel 5.46 Tanggapan Responden Tentang Potensi pendapatan asli daerah persiapan.....	96
Tabel 5.47 Pendapatan Asli Daerah Kepulauan Kundur	96
Tabel 5.48 Tanggapan Responden Tentang Pengelolaan keuangan dan aset daerah.....	97
Tabel 5.49 Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun.....	98
Tabel 5.50 Laporan realisasi anggaran belanja daerah Kepulauan Kundur.....	98
Tabel 5.51 Tanggapan Responden Tentang aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan.....	99
Tabel 5.52 Jumlah sekolah di Kepulauan Kundur	99
Tabel 5.53 Tanggapan Responden Tentang aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan.....	100
Tabel 5.54 Jumlah fasilitas kesehatan Kepulauan Kundur	101
Tabel 5.55 Tanggapan Responden Tentang aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur.....	101
Tabel 5.56 Tanggapan Responden Tentang Jumlah pegawai aparatur sipil Negara	103

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Karimun	46
Gambar 5.1 Kantor Bupati Persiapan Kabupaten Kepulauan Kundur.....	72
Gambar 5.2 Waduk PDAM Tirta Karimun Cabang Tangjung Batu	74
Gambar 5.3 Pasar rakyat terpadu Kecamatan Kundur	103
Gambar 5.4 Rancangan Tata Ruang Daerah di Kepulauan Kundur	108
Gambar 5.5 Perincian dari Tata Ruang Daerah Kepulauan Kundur	109
Gambar 5.6 Rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah	124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota, berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri daerah pemerintahannya, daerah otonomi baru ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Daerah otonomi baru meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan sebagai pembangunan kearah yang lebih baik.

Fungsi daerah otonom ialah salah satunya meningkatkan pelayanan publik disuatu daerah yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6) :“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten/kota, pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan administratif berikut penjelasan persyaratan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemekaran daerah sesuai Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah di antaranya yaitu:

1. Persyaratan Dasar.

a. Persyaratan dasar wilayahan, yaitu:

1. Luas wilayah minimal;
2. Jumlah penduduk minimal;
3. Batas wilayah;
4. Cakupan wilayah;
5. Batas usia minimal daerah.

b. persyaratan dasar kapisitas daerah, yaitu:

1. geografi;
2. demografi;
3. keamanan;
4. sosial politik. Adat, dan tradisi;
5. potensi ekonomi;
6. keuangan daerah;
7. kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Persyaratan Administratif.

a. Untuk daerah provinsi meliputi:

1. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk.

b. Untuk daerah kabupaten/kota meliputi:

1. keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah kabupaten/kota;
2. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota daerah induk; dan
3. persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Mengingat Kepulauan Kundur adalah daerah kepulauan maka pada

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 29

ayat (5) yang mengatakan “Strategi percepatan Pembangunan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi prioritas pembangunan dan

pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi,

pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia,

pembangunan” makanya rasanya perlu pengembangan daerah guna tercapainya

strategi percepatan pembangunan dan penataan daerah sesuai dengan Pasal di

atas. Pada Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, maka penataan daerah bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan
- f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Kepulauan Kundur merupakan wilayah yang berbentuk kepulauan dan daerah yang tergabung dalam Kepulauan Kundur ialah Kecamatan Kundur, Kundur Barat, Kundur Utara, Belat, Ungar, Durai. Instansi pemerintahan berpusat di pulau Karimun maka secara tidak langsung masyarakat yang berdomisili di Kepulauan Kundur untuk mendapatkan pelayanan dan mengurus berbagai pelayanan yang dibutuhkan harus pergi ke pusat kabupaten yaitu di pulau Karimun, dimana untuk menuju pulau Karimun masyarakat pulau Kundur dan sekitarnya harus menyebrangi laut dengan menggunakan transportasi angkutan laut berupa kapal dan sebagainya yang ditempuh dengan waktu cukup lama, contohnya dari pulau kundur lebih kurang 1 jam, dan untuk masyarakat yang berada di kecamatan Durai yang jarak nya lebih jauh lagi bisa mencapai 2 jam perjalanan lewat laut untuk menuju ke pusat Kabupaten.

Menurut aspirasi masyarakat seharusnya masyarakat yang berdomisili di Kepulauan Kundur dapat dimekarkan untuk mengurangi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat saat ini. Diantara peningkatan pelayanan yang lebih efisien

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa harus jauh-jauh untuk mendapat pelayanan, pendidikan, ekonomi dan juga persoalan lainnya.

Seharusnya dengan pemekaran ini pemerintah dapat melakukan perubahan diberbagai masalah utama yang terjadi dipulau kundur dan sekitarnya.

Diantaranya adalah :

- a. Efektifitas biaya
- b. Estimasi waktu
- c. Pelayanan yang baik
- d. Pembangunan yang merata yang ditimbulkan dari pemekaran yang baik dari pembangunan, pendidikan, kesehatan, pelayanan mayarakat dan hal-hal lain yang dianggap penting.

Di Kepulauan Kundur, rencana pemekaran kepulauan kundur untuk menjadi sebuah kabupaten baru sudah lama diperbincangkan yaitu tahun 2011. Namun sampai saat ini belum terealisasikan pemekarannya. Padahal persyaratan dalam pembentukan daerah yang ingin dimekarkan sudah terpenuhi semuanya mulai dari persyaratan dasar dan persyaratan kewilayahan dan sampai sekarang belum ada pengesahan Kepulauan Kundur menjadi Daerah Otonomi Baru.

Pada awalnya rancangan pemekaran kepulauan kundur sudah dimasukkan kedalam agenda Rapat Paripurna DPR mendengar laporan Ketua Panja Pemekaran Hakam Naja dan Ketua Komisi II DPR Agun sudarsa, Senin 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

september 2014 DPR memutuskan untuk tidak mengesahkan 65 Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diajukan diparlemen. Satu dari 65 DOB dan termasuklah itu Kabupaten Kepulauan Kundur di Provinsi Kepri.

DOB yang batal disahkan oleh DPR RI periode 2009-2014

1. Kabupaten Pantai Barat Mandailing, Sumut
2. Kabupaten Simalungun Hataran, Sumut
3. Kabupaten Renah Indojati, Sumbar
4. Pembentukan Kota Muara Bungo, Jambi
5. Kabupaten Pantai Timur, Sumsel
6. Kabupaten Kikim Area, Sumsel
7. Kabupaten Lembak, Bengkulu
8. **Kepulauan Kundur, Kepulauan Riau**
9. Kabupaten Bogor Barat, Jawa Barat
10. Sukabumi Utara, Jawa Barat
11. Garut Selatan, Jawa Barat
12. Kabupaten Lombok Selatan, NTB
13. Kabupaten Adonara, NTT
14. Kota Maumere, NTT
15. Sekayam Raya, Kalimantan Barat
16. Kabupaten Banua Landjak, Kalimantan Barat
17. Paser Selatan, Kaltim
18. Kabupaten Berau Pesisir Selatan, Kaltim
19. Kota Langowan, Sulut
20. Kota Tahuna, Sulut
21. Kabupaten Talaud Selatan, Sulut
22. Kabupaten Bone, Sulsel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23. Kabupaten Boliyohutu, Gorontalo
24. Kabupaten Pinipi, Gorontalo
25. Kabupaten Gorontalo Barat, Gorontalo
26. Kabupaten Kepulauan Obi, Maluku Utara
27. Kabupaten Wasile, Maluku Utara
28. Kota Merauke, Papua
29. Kota Lembah Baliem, Papua
30. Kabupaten Okikha, Papua
31. Kabupaten Grime Nawa, Papua
32. Kabupaten Pulau Numfor, Papua
33. Kabupaten Ketangban, Papua
34. Kabupaten Yahuhimo Barat Pegunungan Seir, Papua
35. Kabupaten Memberamo Hulu, Papua
36. Kabupaten Yakuhiho Barat Daya, Papua
37. Kabupaten Yakuhiho Timur, Papua
38. Kabupaten Yakuhiho Utara, Papua
39. Kabupaten Yalimek, Papua
40. Kabupaten Bogoga, Papua
41. Kabupaten Baliem Centre, Papua
42. Kabupaten Ghondumi Sisare, Papua
43. Kabupaten Muyu, Papua
44. Kabupaten Admi Korbai, Papua
45. Kabupaten Muara Digul, Papua
46. Kabupaten Puncak Trikora, Papua
47. Kabupaten Yapen Timur, Papua
48. Kabupaten Yapen Barat, Papua
49. Kabupaten Malamoi, Papua Barat
50. Kabupaten Maybrat Sau, Papua Barat
51. Kota Manokwari, Papua Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

52. Kabupaten Manokwari Barat, Papua Barat
53. Kabupaten Kokas, Papua Barat
54. Kabupaten Immeke, Papua Barat
55. Kabupaten Raja Ampat Utara, Papua Barat
56. Kabupaten Raja Ampat Selatan, Papua Barat
57. Kabupaten Moskona, Papua Barat
58. Provinsi Tapanuli
59. Provinsi Kepulauan Nias
60. Provinsi Pulau Sumbawa
61. Provinsi Kapuas Raya
62. Provinsi Bolaang Mangondow Raya
63. Pembentukan Provinsi Papua Selatan
64. Provinsi Papua Tengah
65. Provinsi Papua Barat Daya

Wakil Ketua Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja mengungkapkan sebenarnya ada 21 DOB yang dinilai pemerintah layak dimekarkan termasuk Kepulauan Kundur. Tapi Panja dan Pemerintah memutuskan menunda pengesahan dengan berbagai pertimbangan. DPR menjelaskan, penundaan pembahasan dilakukan agar tidak timbul rasa cemburu diantara daerah-daerah yang mengusulkan DOB. (Batamtoday.com “Rapat Paripurna DPR Batalkan Pembentukan Kabupaten Kundur, Natuna Barat dan Natuna Selatan” 29 September 2014)

Namun pada kenyataannya setelah diajukan persyaratan dasar dan persyaratan administratif sebagai pembentukan daerah Kabupaten Kepulauan Kundur yang ingin dimekarkan dan telah diusulkan oleh DPR Provinsi ke

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Pemerintahan Pusat terjadi pembatalan Daerah Otonomi Baru. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Faktor Penyebab Kepulauan Kundur Gagal menjadi Daerah Otonom Baru"

1.2 Perumusan masalah

1. Apakah Kepulauan Kundur layak menjadi Daerah Otonom Baru di Provinsi Kepulauan Riau?
2. Apa faktor Penyebab Kepulauan Kundur Gagal menjadi Daerah Otonom Baru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka secara objektif penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apakah layak Kepulauan Kundur menjadi Daerah Otonom Baru di Kepulauan Riau?
2. Untuk mengetahui Penyebab Gagalnya Kepulauan Kundur menjadi Daerah Otonom Baru?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai sarana bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang Pembentukan dan Pemekaran Daerah.
2. Memberikan masukan kepada pemerintah setempat untuk mengambil langkah-langkah dalam pembangunan Daerah Otonom Baru dan mengetahui apa penyebab gagalnya suatu daerah yang tidak layak dimekarkan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari solusi dan dukungan untuk merealisasikan daerah yang ingin dimekarkan.

3. Sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengantar secara mendalam, khususnya pada kajian masalah tentang Daerah Otonomi Baru.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam memperoleh gambaran umum yang sistematis terhadap penelitian ini maka disusun sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini sebagai pendahuluan dimana penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis mengemukakan teori yang erat hubungannya dengan permasalahan yang berhubungan dengan dengan Otonomi daerah, Pemekaran daerah Kabupaten/Kotayang keterkaitan dengan hak, wewenang,dan kewajiban suatu daerah untuk membentuk dan menjalankan suatu pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB III : METODE PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan sejarah serta aktifitas Kepulauan Kundur, dari struktur yang ada di pemerintahan pada tiap-tiap Kecamatan yang termasuk wilayah yang akan dilakukan pemekaran.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini merupakan dari seluruh rangkaian skripsi ini. Dimana akan diberikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan serta mengemukakan beberapa saran yang dapat memberikan sumbangan pemikiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah dilahirkan sebagai wujud kepercayaan pemerintah pada daerah melalui kepercayaan tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola daerahnya dengan lebih baik, efisien, adil, dan menata otonomi daerah yang dicanangkan dalam rangka tercapainya suatu bangsa yang lebih demokratis dan sistem pemerintahan yang lebih responsif.

H.A.W.Widjaja (2002:81) otonomi pada saat ini semakin membuka pandangan baru bagi kinerja birokrasi dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat dimana yang tadinya birokrasi dianggap lamban, lambat, dan berbelit-belit serta sangat termalitas yang semuanya diubah menjadi seiring dengan dinamika masyarakat dan perkembangannya kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks dan semakin baik, cepat, tepat dan kinerja semakin baik pula dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan persaingan global serta tuntutan referensi, diperlukan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi pemerintahan di Indonesia pemerintahan bergeser ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab.

Hakikat otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban suatu daerah untuk membentuk dan menjalankan suatu pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, sebagaimana dijelaskan mengenai kewenangan daerah, kewajiban kepala daerah dan hal-hal yang terkait dalam Undang-undang yang telah ditetapkan.

Perjalanan bangsa Indonesia melalui berbagai sistem pemerintahan dan dipimpin berbagai macam kepala pemerintahan serta muncul masalah-masalah baru dalam lingkungan pemerintahan atau lingkungan masyarakat tentu sangat membutuhkan tatanan hukum yang berbeda dari waktu ke waktu untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

Keberadaan kebijakan mengenai pemerintahan daerah bukan merupakan hal yang final, statis dan tetapi membutuhkan pembaruan-pembaruan untuk mengatasi berbagai keadaan dan masalah baru yang muncul. Berikut ini adalah sejarah perkembangan undang-undang yang menjadi pedoman mengenai otonomi daerah :

1. UU No. 1 Tahun 1945 mengatur pemerintahan daerah yang membagi tiga jenis daerah otonom, kepresidenan, kabupaten dan kota.
2. UU No. 2 Tahun 1948 mengatur susunan pemerintahan daerah yang demokratis, membagi dua jenis daerah otonom, yakni daerah otonom biasa dan daerah otonomi istimewa dan tiga tingkatan daerah otonom, yakni provinsi, kab/kota dan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. UU No.1 Tahun 1957 mengatur tunggal yang berseragam untuk seluruh Indonesia
4. UU No. 18 Tahun 1965 mengatur otonomi yang menganut sistem yang riil dan seluas luasnya.
5. UU No. Tahun 1974 mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah (prinsip yang dipakai : otonomi yang nyata dan bertanggung jawab; merupakan pembaruan dari otonomi daerah yang seluas luasnya dapat menimbulkan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan NKRI, dan tidak serasi dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi).
6. UU No.22 Tahun 1999 mengatur tentang pemerintahan daerah (perubahan mendasar pada format otonomi daerah dan substansi desentralisasi).
7. UU No.25 Tahun 1999 mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
8. UU No.32 Tahun 2004 mengatur pemerintahan daerah sebagai pengganti UU No.22 Tahun 1999.
9. UU No.33 Tahun 2004 mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (perubahan UU didasarkan berbagai UU yang terkait dibidang politik dan keuangan negara antara lain : UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR,DPD, dan DPRD; UU No.22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR, DPD; UU No.23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden; UU No.17 tahun 2003

tentang keuangan negara; UU No.1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara; UU No.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara).

Sedangkan perubahan yang mendasar dari pedoman otonomi daerah dari UU No.22 tahun 1999 digantikan oleh UU No. 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip otonomi daerah dalam UU No.22 tahun 1999
 - a. Demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah.
 - b. Otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab.
 - c. Otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota.
 - d. Sesuai dengan konstitusi negara.
 - e. Kemandirian daerah otonom.
 - f. Meningkatkan peranan Badan Legislatif Daerah.
 - g. Asas dekontralisasi diletakkan pada daerah otonomi sebagai wilayah administratif.

2. Asas tugas perbantuan.

1. Prinsip-prinsip otonomi daerah dalam UU No.32 tahun 2004.
 - a. Demokrasi, keadilan, pemerataan, kekuasaan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
 - b. Otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Otonomi luas : daerah yang memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Otonomi nyata : penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
3. Otonomi yang bertanggungjawab : dalam penyelenggaraan otonomi harus sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonom, yaitu pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 - a. Otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota.
 - b. Sesuai dengan konstitusi negara.
 - c. Kemandirian daerah otonom.
 - d. Meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah.
 - e. Asas dekontralisasi diletakkan pada daerah provinsi sebagai wilayah administrasi.
 - f. Asas tugas perbantuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tujuan Otonomi Daerah

Proses peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintahan daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan umum pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. (HAW. Widjaja, 2002:22).

Otonomi daerah menurut UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat (3) menyebutkan “pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebuah pelayanan yang maksimal dan memadai diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya sesuai yang diharapkan.

- b. Meningkat pelayanan umum.

Dengan adanya otonomi daerah diharapkan ada peningkatan pelayanan publik secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerah. Dengan

pelayanan maksimal tersebut diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah.

3. Meningkatkan daya saing daerah.

Dengan menerapkan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu pada semboyan negara kita “Bhineka Tunggal Ika” Berbeda-beda tapi tetap satu.

Melihat otonomi daerah yaitu memberikan hak kepada setiap daerah otonom untuk mengatur daerahnya sendiri, agar mereka memiliki kebebasan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya, juga mempermudah pemerintah daerah otonom untuk mengetahui atau mengerti kebutuhan masyarakat didalamnya. Adapun manfaat otonomi daerah :

1. Memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintahan pusat.
2. Perumusan kebijaksanaan dari pemerintah akan lebih realistik.
3. Desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya “pemerataan” yang lebih baik dari pemerintahan pusat bagi daerah-daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat, dimana seringkali rencana pemerintah tidak dipahami oleh masyarakat setempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis keagamaan di dalam perencanaan pembangunan dapat memperluas dalam mengalokasikan sumber daya dan investasi pemerintah.
5. Peluang bagi pemerintahan serta lembaga swasta dan masyarakat di daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan managerial.
6. Struktur pemerintahan yang didesentralisasikan diperlukan guna melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program.
7. Dapat meningkatkan pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh elite lokal, yang seringkali tidak simpatik dengan program pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan kalangan miskin di pedesaan.
8. Administrasi pemerintahan menjadi mudah disesuaikan, inovatif, kreatif. Kalau mereka berhasil maka dapat dicontoh oleh daerah lainnya.
9. Memungkinkan pemimpin daerah menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif, mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolasi, memonitor dan melakukan evaluasi implementasi proyek pembangunan dengan lebih baik dari pada yang dilakukan oleh pejabat di pusat.

2.2 Pemekaran Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemecahan daerah provinsi atau daerah kab/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Pada dasarnya pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat memaksimalkan peraturan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah.

Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah. Sementara dalam praktiknya sampai dengan saat ini. Mekanisme pembentukan daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1. Pembentukan daerah dilakukan melalui mekanisme daerah persiapan dengan jangka 3 tahun dan maksimal 5 tahun kepentingan strategis nasional.
2. Persyaratan administrasi dan persyaratan dasar kewilayahan usulan pembentukan daerah persiapan dimiliki oleh pemerintahan pusat.
3. Persyaratan dasar kapisitas daerah dinilai oleh tim kajian independence yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan pemerintahan pusat.
4. Pembentukan daerah persiapan ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
5. Pemerintahan pusat melakukan evaluasi akhir kepada daerah persiapan.
 - a. Daerah persiapan dengan hasil evaluasi akhir yang dinyatakan layak akan ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonomi baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Daerah persiapan dengan evaluasi yang dinyatakan tidak layak akan dicabut status daerah persiapannya dan dikembalikan ke daerah induknya.

Pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten/kota, pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan administratif berikut penjelasan persyaratan pemekaran daerah sesuai Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah diantaranya yaitu:

1. Persyaratan dasar, persyaratan dasar meliputi:
 - a. Persyaratan dasar wilayahan, yaitu:
 - b. Luas wilayah minimal; ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.
 - c. Jumlah penduduk minimal; ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.
 - d. Batas wilayah; dibuktikan pada koordinat pada peta dasar.
 - e. Cakupan wilayah; paling sedikit 5 daerah kabupaten/kota untuk pembentukan daerah provinsi paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan daerah kabupaten, dan paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan daerah kota.
 - f. Batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan; batas usia minimal daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan daerah kabupaten/kota 7(tujuh) tahun terhitung sejak pembentkan; dan batas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minimal kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.

persyaratan dasar kapisitas daerah, adalah kemampun daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang didasarkan pada parameter:

- a. geografi; meliputi lokasi ibu kota hidrografi; dan kerawa kerawanan bencana
- b. demografi ; meliputi kualitas sumber daya manusia dan distribusi penduduk
- c. keamanan; meliputi tindakan kriminal umum dan konflik sosial.
- d. sosial politik. Adat, dan tradisi; meliputi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, kohesipitas sosial; dan organisasi kemasyarakatan
- e. potensi ekonomi; meliputi pertumbuhan ekonomi dan potensi unggulan daerah.
- f. keuangan daerah; meliputi kapasitas PAD induk. Potensi pendapatan asli calon daerah persiapan, dan pengelolaan keuangan dan aset daerah
- g. kemampuan penyelenggaraan pemerintahan; meliputi aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan, aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan, aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur, jumlah pegawai aparatur sipil negara didaerah induk, dan rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Persyaratan Administratif. Persyaratan administratif disusun dengan tata urutan sebagai berikut:
 - a. Untuk daerah provinsi meliputi:
 - b. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi;
 - c. persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk.
 - d. Untuk daerah kabupaten/kota meliputi:
 - e. keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah kabupaten/kota;
 - f. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota daerah induk; dan
 - g. persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 29 ayat (5) yang mengatakan “Strategi percepatan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi prioritas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan” makanya rasanya perlu pengembangan daerah guna tercapainya strategi percepatan pembangunan dan penataan daerah sesuai dengan pasal di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas. Pada pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penataan daerah bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan
- f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

a. Tujuan Pemekaran Daerah Otonom Baru

Menurut Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007, Pemekaran Daerah/wilayah adalah pemecahan suatu Pemerintah baik Provinsi, Kabupaten/Kota , Kecamatan, Desa/Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Menurut Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000, tentang Persyaratan Pembentukan dan criteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, pada Pasal 2 menyebutkan Pemekaran Daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Percepatan pelayanan kepada masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban

6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Terdapat beberapa alasan kenapa Pemekaran Daerah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu

- a. keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui Pemerintahan Daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui Pemerintah Daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
- b. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berdasarkan potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini belum tergali.
- c. Penyerapan tenaga kerja secara yang lebih luas di sektor Pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan Pemekaran Daerah.

Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota menjadi beberapa daerah Kabupaten/Kota baru pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon Kabupaten/Kota baru yang dibentuk diperlukan keseimbangan antara basis sumberdaya antara satu dengan yang lainnya. Hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang mencolok dimasa yang akan datang. Selanjutnya, dalam usaha Pembentukan Daerah Pemekaran perlu dibentuk ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif masyarakat di suatu Daerah Pemekaran.

2.4 Konsep Islam

Surah Hud ayat 77

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ
هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ
رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (٦١)

Artinya :

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata:

"Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)". (Hud 11:61)

Yang dimaksud ayat ini ialah manusia sebagai pemakmur bumi karena Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi dengan itu manusia bertugas memakmurkan atau membangun bumi ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh yang menugasnya yaitu Allah SWT. Maksud manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia serta mengolahnya, mereka bisa membangun bangunan di atasnya, menanam pepohonan, menggarap tanahnya, memanfaatkan sumber daya alamnya, dan lain sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Kesimpulan
1	Hidayat	2016	Analisis faktor pendukung dan penghambat Kepulauan Kundur menjadi Kabupaten.	<p>1. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Pemekaran Daerah di Kepulauan Kundur untuk menjadi Kabupaten?</p> <p>2. Bagaimana upaya dan dukungan Pemerintah Kabupaten Karimun dalam usaha Merealisasikan Pemekaran Kepulauan Kundur?</p>	<p>1. Untuk mengetahui Apa saja faktor pendukung dan penghambat Pemekaran Daerah di Kepulauan Kundur untuk menjadi Kabupaten?</p> <p>2. Untuk mengetahui Bagaimana upaya dan dukungan Pemerintah Kabupaten Karimun dalam usaha Merealisasikan Pemekaran Kepulauan Kundur?</p>	Kesimpulannya bahwasanya persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif sudah terpenuhi dan menjadi faktor pendukung sedangkan persyaratan kapasitas daerah tidak semuanya terpenuhi dan menjadi faktor penghambat. Perbedaan penelitian ini meneliti tentang faktor pendukung dan penghambat Kepulauan Kundur menjadi Kabupaten sedang Penulis meneliti tentang penyebab gagalnya Kepulauan Kundur menjadi Daerah Otonom Baru dan menjadi persamaan dengan faktor Penghambat.
2	Fitri Anggraini	2016	Implementasi Peraturan Pemerintah Republik	1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Studi	1. Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008	Kesimpulannya bahwasanya masalah dipenelitian ini disebabkan oleh beberapa hambatan, diantaranya

		Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Studi Kelayakan Pemekaran Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)	Kelayakan Pemekaran Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis) 2. Apa saja faktor-faktor penghambat Pemekaran Kecamatan Mandau?	tentang Kecamatan (Studi Kelayakan Pemekaran Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis) 2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pemekaran Kecamatan Mandau?	kurangnya cakupan wilayah diawal pengajuan pemekaran, lambatnya tanggapan terhadap aspirasi masyarakat, adanya faktor politik dan adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Perbedaannya Penelitian ini melihat Kecamatan Mandau apakah layak dimekarkan persamaannya sam-sama meneliti tentang pemekaran.
3	Roviqi	2017 Analisis Pemekaran Wilayah Kabupaten Indragiri Selatan sebagai Daerah Otonom Baru	1. Bagaimana Pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan sebagai Daerah Otonom Baru? 2. Apa faktor-faktor Penghambat yang dihadapi dalam Persiapan sebagai Daerah Otonom Baru?	1. Untuk menganalisis Pemekaran Wilayah Kabupaten Indragiri Selatan sebagai Daerah Otonom Baru 2. Untuk mengetahui faktor-faktor Penghambat yang dihadapi dalam Persiapan Daerah Otonom Baru	Kesimpulannya bahwasanya masalahnya di penelitian ini adanya Peraturan Perundang-Undangan, adanya Moratorium dari Pemerintah Pusat Perbedaannya Penelitian ini menganalisis Pemekaran Indragiri Selatan menjadi daerah Otonom Baru persamaannya sama-sama meneliti tentang pemekaran.

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni, adalah :

1. Perbedaan Penelitian Hidayat, meneliti tentang faktor pendukung dan penghambat Kepulauan Kundur menjadi Kabupaten sedangkan Penulis meneliti tentang penyebab gagalnya Kepulauan Kundur menjadi Daerah Otonom Baru.
2. Perbedaan Penelittian Fitri Anggraini, meneliti tentang Kecamatan Mandau apakah layak dimekarkan atau tidak layak sedangkan Penulis meneliti tentang penyebab gagalnya Kepulauan Kundur menjadi Daerah Otonom Baru.
3. Perbedaan Penelitian Roviqi ini menganalisis Pemekaran Indragiri Selatan menjadi daerah Otonom Baru sedangkan Penulis meneliti tentang penyebab gagalnya Kepulauan Kundur menjadi Daerah Otonom Baru.

2.6 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah untuk membangun persamaan persepsi dan pengertian serta menghindari salah pengertian terhadap istilah yang digunakan pada judul ini, maka aka dioperasionalkan beberapa konsep yang bersifat membatasi.

1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

2. Gagal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tidak berhasil, tidak tercapai.
3. Pemekaran wilayah Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Daerah Otonomi Baru bahwa pemekaran daerah sebagaimana pasal 32 ayat (1) Pemekaran daerah provinsi dan daerah untuk menjadi dua atau lebih atau menggabungkan bagian dari daerah yang bersanding dalam satu provinsi menjadi satu daerah baru.
4. Pemekaran Kepulauan Kundur adalah pembentukan daerah berupa pemekaran dari satu daerah Kabupaten Karimun menjadi kabupaten lain di mana terdiri dari Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Ungar, Kecamatan Belat, Kecamatan Durai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub indikator
Faktor penyebab pemekaran Kepulauan Kundur menjadi Daerah Otonomi Baru (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah).	1. Persyaratan Dasar Kewilayahan	a. Wilayah Minimal b. Jumlah Penduduk c. Batas Wilayah d. Cakupan Wilayah e. Batas Usia Minimal Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
	2. Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah	a. Geografi, b. Demografi, c. Keamanan, d. Sosial, politik, adat, dan tradisi; e. Potensi ekonomi, f. Keuangan daerah, g. Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.
	3. Persyaratan Administratif	1. Keputusan Musyawarah Desa yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. 2. Persetujuan bersama DPRD Kabupaten/Kota induk dengan Bupati/Walikota daerah induk. 3. Persetujuan DPRD Provinsi dengan Gubernur daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Sofair silaen dan Widiyono (2013:71), variabel yang disusun berdasarkan jenjang atau tingkatan dalam suatu atribut tertentu, tetapi perbedaan masing-masing

tingkatan tidak ada batas yang jelas/pasti atau masing-masing kategori mempunyai jarak yang berbeda dan frekuensi nilainya dilakukan dengan jalan perhitungan, bukan pengukuran. Misalnya, sub indikator dikategorikan: “sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik”. Dalam perbedaan ini tingkat/jenjang antara “sangat baik dan baik tidak dapat ditentukan dengan jelas atau tidak mempunyai batas jarak tertentu.

Pada Konsep Operasional tentang faktor penyebab Kepulauan Kundur gagal menjadi Daerah Otonom Baru. Apabila 3 indikator terpenuhi bisa dikatakan “sangat baik atau baik”, jika 2 indikator terpenuhi bisa dikatakan “kurang baik” dan hanya 1 indikator terpenuhi bisa dikatakan “tidak baik”.

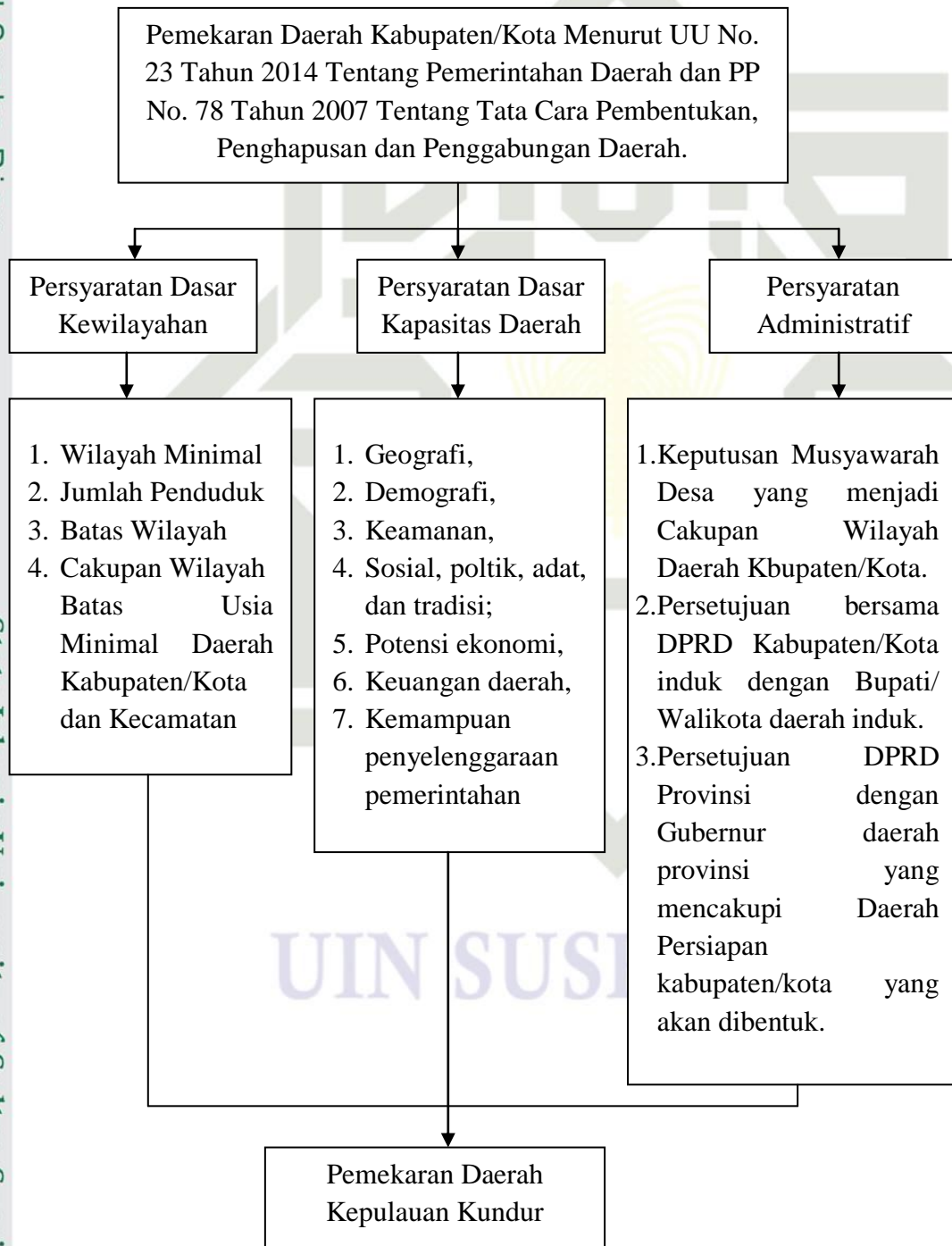
Dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, untuk dapat membedakan masing-masing tingkatannya maka pada jenjang tertinggi diberi skor tertinggi, misalnya 4 pada kategori” sangat baik”, jenjang dibawahnya diberi skor 3, dan seterusnya sampai jenjang terendah dengan skor 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Pemikiran

Berikut ini gambar dari kerangka pemikiran penelitian analisis faktor penyebab pemekaran Kepulauan Kundur mejadi Daerah Otonomi Baru



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif, Penelitian Kualitatif menurut Sugiyono (2003:11) yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui variable mandiri baik satu atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa Faktor Penyebab Kepulauan Kundur Gagal menjadi Daerah Otonom Baru.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kepulauan Kundur, alasan pemilihan tempat ini di karenakan Kepulauan Kundur yang merupakan objek penelitian ini daerah yang sebenarnya sudah lama untuk dimekarkan namun hingga sekarang belum terlaksanakan. Adapun penelitian ini berlangsung pada bulan April hingga sampai dikatakan layak diuji.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya. Relevan dan lengkap jenis data dari penelitian ini yaitu data kualitatif bersifat deskriptif.

Menurut Saryono,2010:1) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Meleong, mendefenisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah,2010:9).

Jenis dan sumber data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini antara lain, berupa:

1. Data primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data jika kuisioner disebarluaskan melalui internet (Uma Sekaran,2011). Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan dari narasumber yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah seperti :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur,
2. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Kepulauan Kundur,
3. Keputusan DPRD Kabupaten Karimun Tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Karimun terhadap Usulan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur,
4. Keputusan Bupati Karimun tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Kepulauan Kundur
5. Keputusan Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur tentang Susunan Pengurus Badan Pekerja Pemebentukan Kepulauan Kundur.

Dapat diperoleh melalui :

- a. Melakukan wawancara dengan informan penelitian terkait dengan masalah Pemekaran Kepulauan Kundur.
- b. Memberikan Kuesioner kepada responden yang mengetahui tentang masalah Pemekaran Kepulauan Kundur

2. Data skunder

Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa dokumen-dokumen, buku, catatan, bukti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. hal ini sebagai bukti penelitian dapat mendukung dan menjelaskan masalah tentang permasalahan tentang Kepulauan Kundur Gagal menjadi Daerah Otonom Baru sebagai objek yang sedang diteliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan penelitian terhadap analisis faktor pendukung dan penghambat pemekaran Kepulauan Kundur, maka metode pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Wawancara

Yaitu bentuk komunikasi antara peneliti dengan para subjek yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan.

2. Dokumenter

Yaitu alat pengumpulan datanya disebut form pencatatan dokumenter . dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia. Juga termasuk dokumen-dokumen ekspresif, seperti biografi, autobiografi, surat-surat dan buku harian. Dan termasuk juga laporan media masa baik melalui surat kabar, majalah, radio, televisi, maupun media cetak dan elektronis lainnya.

3. Kuisioner

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan beserta alternatif jawaban yang diberikan kepada responden menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan keadaan yang ada didasarkan kepada indikator peneliti.

3.5 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2011:90) populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.

Pada penelitian yang berjudul Analisis faktor penyebab Kepulauan Kundur Gagal menjadi Daerah Otonom Baru dan melihat apa penyebabnya Kepulauan Kundur Gagal dimekarkan maka populasi penelitian ini meliputi orang yang terlibat dalam Pemekaran Kepulauan Kundur.

Tabel 3.1 Jumlah Populasi Pemekaran Kepulauan Kundur

No	Instansi	Jumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	Pemerintah Provinsi	5.154 Orang
2	DPRD Provinsi	45 Orang
3	Pemerintah Daerah Kabupaten	3.823 Orang
4	DPRD Kabupaten	30 Orang
Total		9.052 Orang

Sumber Data : BPS Kepulauan Riau 2018

Maka Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi dan Kabupaten yang menjadi populasi dalam penelitian tentang faktor penyebab Kepulauan Kundur Gagal menjadi Daerah Otonom Baru berjumlah 9.052 jiwa. Dan dikategorikan menjadi beberapa unsur yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Karimun
2. DPRD Kabupaten Karimun
3. Pemerintah Kecamatan
4. Badan Pembentukan
5. Tokoh Masyarakat.

2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono(2011:91), adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki karakteristik tersebut. Apabila populasi terlalu besar maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasi, misalnya karena keterbatasan dana, financial, waktu, tenaga dan sebagainya maka peneliti dapat menggunakan sampel itu.

Usman (2009:44) menjelaskan teknik sampling kluster atau teknik sampling daerah merupakan teknik yang ada digunakan apabila populasi tersebar beberapa daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan dan seterusnya. Untuk menentukan siapa yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan populasi yang ditetapkan. Sehubungan itu, Sugiyono (2011:94) menjelaskan teknik sampling daerah seiring digunakan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah, dan tahap kedua menentukan orang-orang yang ada di daerah itu secara sampling juga.

Adapun sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2009:96) Sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti, lazimnya didasarkan atas criteria atau pertimbangan tertentu.

Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, atau penelitian tentang politi disuatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang ahli politik. Sampelnya ini cocok digunakan untuk peneliti kualitatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari itu Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam Pemekaran Kepulauan Kundur dalam jumlah tertentu dan pertimbangan tertentu yaitu :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun (Bagian Tata Pemerintahan Umum) diambil 10 orang sampel karena mereka terlibat dan menjadi wewenang mereka dalam kesejahteraan masyarakat.
2. DPRD Kabupaten Karimun terdiri dari Sekretaris Dewan dan (Komisi 1) diambil 4 orang sampel karena mereka adalah orang terlibat dan menjadi wewenang mereka dalam otonomi daerah
3. Badan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur terdiri Ketua, Wakil dan Sekretaris BP3K2 diambil 1 orang karena terlibat dalam Pemekaran Daerah Kepulauan Kundur
4. Pemerintah Kecamatan terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kundur, Kundur Barat, Kundur Utara, Belat, Durai dan Ungar diambil 5 orang Camat. Karena tergabung dalam Daerah Kepulauan Kundur
5. Tokoh Masyarakat diambil 1 orang yang memiliki pengaruh dan dihormati masyarakat dan pernah berjuang dalam Pemekaran Daerah.

Tabel 3.2 Sampel Pemekaran Kepulauan Kundur

No	Keterangan	Sampel
----	------------	--------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	Pemerintah Kabupaten	10 Orang
2	DPRD Kabupaten	4 Orang
3	Pemerintah Kecamatan	5 Orang
4	Badan Pembentukan	1 Orang
5	Tokoh Masyarakat	1 Orang
	Jumlah	21 Orang

3.6 Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan teknik deskriptif kualitatif yakni analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditentukan dilapangan mengenai Pemekaran Daerah Kepulauan Kundur dalam rangka ingin mengetahui Penyebab Kepulauan Kundur Gagal Menjadi Daerah Otonom Baru. Dengan menggunakan metode tersebut, maka informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk dan uraian dengan rumus persentasenya Skala Likert menurut Riduwan (2009:98) sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$N = \text{Populasi}$

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan Analisis Faktor Penyebab Kepulauan Kundur Gagal Menjadi Daerah Otonom Baru, keseluruhan indikator yang diajukan kepada responden diukur menggunakan teknik pengukuran menurut Suharsimi Ari Kunto sebagai berikut :

Kriteria Interpretasi Skor

- | | |
|--|-----------|
| 1. Tinggi/Maksimal | : 76-100% |
| 2. Cukup/Kurang | : 56-75% |
| 3. Tidak Maksimal/Rendah | : 40-55% |
| 4. Sangat Tidak Maksimal/Sangat Rendah | : 0-39% |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Keadaan Geografis

Kepulauan Kundur merupakan daerah kepulauan yang merupakan bagian wilayah administrasi dari pemerintah Kabupaten Karimun. Kepulauan Kundur adalah daerah yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan besar dimana memiliki luas kurang lebih 3009,38 Km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 165,7 Km² dan wilayah perairan seluas 2843,68 Km². Sebagai daerah kepulauan, karakteristik pulau-pulau di Kundur cenderung mirip. Wilayahnya secara umum berupa dataran yang datar dan landai dengan ketinggian 2 sampai 500 meter di atas permukaan laut, meskipun ada bagian yang merupakan bukit-bukit.

Adapun batasan wilayah Kepulauan Kundur adalah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Karimun, Selat Malaka dan Singapura.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.
- Sebelah Barat : Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Sebelah Timur : Kota Batam

Sedangkan letak wilayah Kepulauan Kundur adalah :

- 00° 24'36" Lintang Utara s/d 01°13'12" Lintang Utara
- 103° 13'12" Bujur Timur s/d 104°00'36" Bujur Timur

Karena Kepulauan Kundur merupakan Daerah yang Berciri Kepulauan tentu wilayahnya memiliki banyak pulau-pulau. Kundur memiliki pulau sebanyak 105 buah pulau dan terdiri dari pulau yang sudah berpenghuni dan 83 pulau yang belum berpenghuni. Ada beberapa pulau-pulau besar yaitu pulau Kundur, Durai, Belat, Ungar.

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Karimun



Kepulauan Kundur mempunyai 30 desa/kelurahan yang saat ini sudah menjadi desa/kelurahan defenitif. Dari seluruh desa/kelurahan tersebut terdiri dari 23 desa dan 7 kelurahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1 : Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan

Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan
1. Kecamatan Kundur	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Tanjungbatu Kota - Kelurahan Tanjungbatu Barat - Kelurahan Gading Sari - Desa Sungai Ungar - Desa Sungai Sebesi - Desa Lubuk
2. Kecamatan Kundur Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Sawang - Desa Sawang Laut - Desa Kundur - Desa Sawang Selatan - Desa Gemuruh
3. Kecamatan Kundur Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Tanjung Berlian - Kelurahan Urung Barat - Desa Sungai Ungar Utara - Desa Teluk Radang - Desa Perayun
4. Kecamatan Durai	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Telaga Tujuh - Desa Sanglar - Desa Semembang - Desa Tanjung Kilang
5. Kecamatan Belat	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Penarah - Desa Sebele - Desa Leboh - Desa Sungai Asam - Desa Degong - Desa Tebias

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kecamatan Ungar	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Alai - Desa Batu Limau - Desa Sungai Buluh - Desa Ngai
--------------------	---

4.2 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kepulauan Kundur pada tahun 2018 memiliki jumlah penduduk sebanyak 80.501 jiwa yang tersebar di enam kecamatan..

Tabel 4.2 : Jumlah Kecamatan dan Jumlah Penduduk

No	Kecamatan	Jumlah penduduk
1	Kundur	30,593
2	Kundur Utara	18,401
3	Kundur Barat	12,699
4	Durai	6,676
5	Belat	6,157
6	Ungar	5,975
Jumlah		80,501

Sumber : Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab.Karimun Tahun 2018

Disektor lain disamping memiliki lahan subur yang mengandung organik, Kepulauan Kundur kaya akan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan. Hasil perkebunan yang menjadi komoditi unggulan diantaranya adalah karet, kelapa, nanas, durian, pisang, rambutan, sahu, gambir, rumput laut, tanaman pangan dan sayuran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari segi letak wilayah Kepulauan Kundur adalah daerah dengan letaknya sangat strategis sangat berdekatan dengan Negara tetangga Singapura dan Malaysia, hal ini membuat Kundur dilirik sebagai pengembangan industry dan investasi dan juga sektor pariwisata yang cukup menonjol.

4.3 Sarana dan Prasarana

Kepulauan kundur memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap yang dapat mendukung Pemekaran di Kepulauan Kundur. Mulai dari sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, hingga perhubungan.

4.3.1 Sarana Pendidikan

Penduduk yang berpendidikan merupakan aset yang sangat berharga bagi pembangunan daerah. Melalui sistem pendidikan yang terpadu dan menjangkau seluruh masyarakat baik di kota maupun di desa, maka diharapkan kualitas pendidikan yang baik itu sarana dan prasarannya meningkat terutama di Kepulauan Kundur. Adapun jumlah fasilitas pendidikan bisa dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 4.3 Jumlah sekolah di Kepulauan Kundur

No	Kecamatan	Jumlah sarana pendidikan						
		Umum				Agama		
		SD	SMP	SMA	SMK	MI	MTs	MA
1	Kundur	17	3	3	1	4	2	1
2	Kundur Barat	13	4	2	1	0	1	1
3	Kundur Utara	8	3	1	1	1	1	0
4	Belat	7	3	1	0	0	0	0

5	Durai	7	3	1	0	0	1	0
6	Ungar	6	2	0	0	1	0	0
Total		58	18	8	3	6	5	2

Sumber data : Badan Pusat Statistik 2018

4.3.2 Sarana Peribadatan

Sarana Peribadatan merupakan salah satu hal penting dalam persyaratan pemekaran suatu kabupaten. Pentingnya sarana peribadatan karena agama merupakan fondasi dasar bagi kehidupan manusia dalam berkehidupan sehari-hari. Baik ataupun buruknya perilaku seorang ditentukan dari ketaatannya beribadah ataupun akhlaknya. Di Kepulauan Kundur mayoritas penduduknya beragama islam. Sarana peribadatan di Kepulauan Kundur dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.4 Sarana Peribadatan

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	131
2	Mushola	142
3	Gereja	21
4	V ihara	6
5	Pura	0

Sumber data : Badan Pusat Statistik 2018

4.3.3 Sarana Kesehatan

Pentingnya sarana kesehatan tentunya merupakan hal yang mendasar yang harus ada disuatu daerah yang berfungsi dan bertujuan untuk menjamin

kesehatan setiap masyarakat. Untuk fasilitas kesehatan yang ada di Kepulauan Kundur tercantum didalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.5 Jumlah fasilitas kesehatan Kepulauan Kundur

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas pembantu	Puskesmas keliling		Klinik/Balai Kesehatan
					Darat	Laut	
	Kundur	0	1	3	5	0	1
	Kundur Barat	0	1	5	2	0	1
	Kundur Utara	0	1	3	4	0	0
4	Belat	0	1	4	0	1	0
5	Durai	0	1	2	1	3	0
6	Ungar	0	0	2	0	1	0
	Total	0	5	19	12	5	2

Sumber data : Badan Pusat Statistik 2018

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat, baik Pemekaran Kepulauan Kundur maupun Pemerintah Kabupaten Karimun.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari berbagai uraian yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepulauan Kundur sudah masuk kedalam 65 Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota dan masuk kedalam Daerah Otonom Baru Rangka ke 3 daerah yang layak dimekarkan. Karena layak dari Persyaratan Dasar Kewilayahan, Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah dan Persyaratan Administratif. Namun kemudian gagal menjadi daerah otonom baru.
2. Penyebab Kepulauan Kundur Gagal menjadi Daerah Otonom Baru, yakni disebabkan 2 Faktor Eksternal dan Faktor Internal yaitu :

1. Faktor Eksternal

Kegagalan Pemekaran Daerah Kepulauan Kundur masih adanya moratorium dari Pemerintahan Pusat hingga saat ini masih belum dicabut

kebijakan moratoriumnya. Terjadinya moratorium akibat pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Faktor Internal

Kegagalan Kepulauan Kundur menjadi daerah otonom baru untuk persyaratan pembentukan daerah yang tercakup pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Persyaratan Dasar Kewilayahan dikategorikan Tinggi/Maksimal, Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah dikategorikan Tinggi/Maksimal, dan Persyaratan Administratif dikategorikan Cukup/Kurang dan hasil rekapitulasi dari 3 indikator Persyaratan Pembentukan Daerah Kepulauan Kundur yaitu berada pada angka 76,14% dikatakan Tinggi/Maksimal.

6.2 Saran

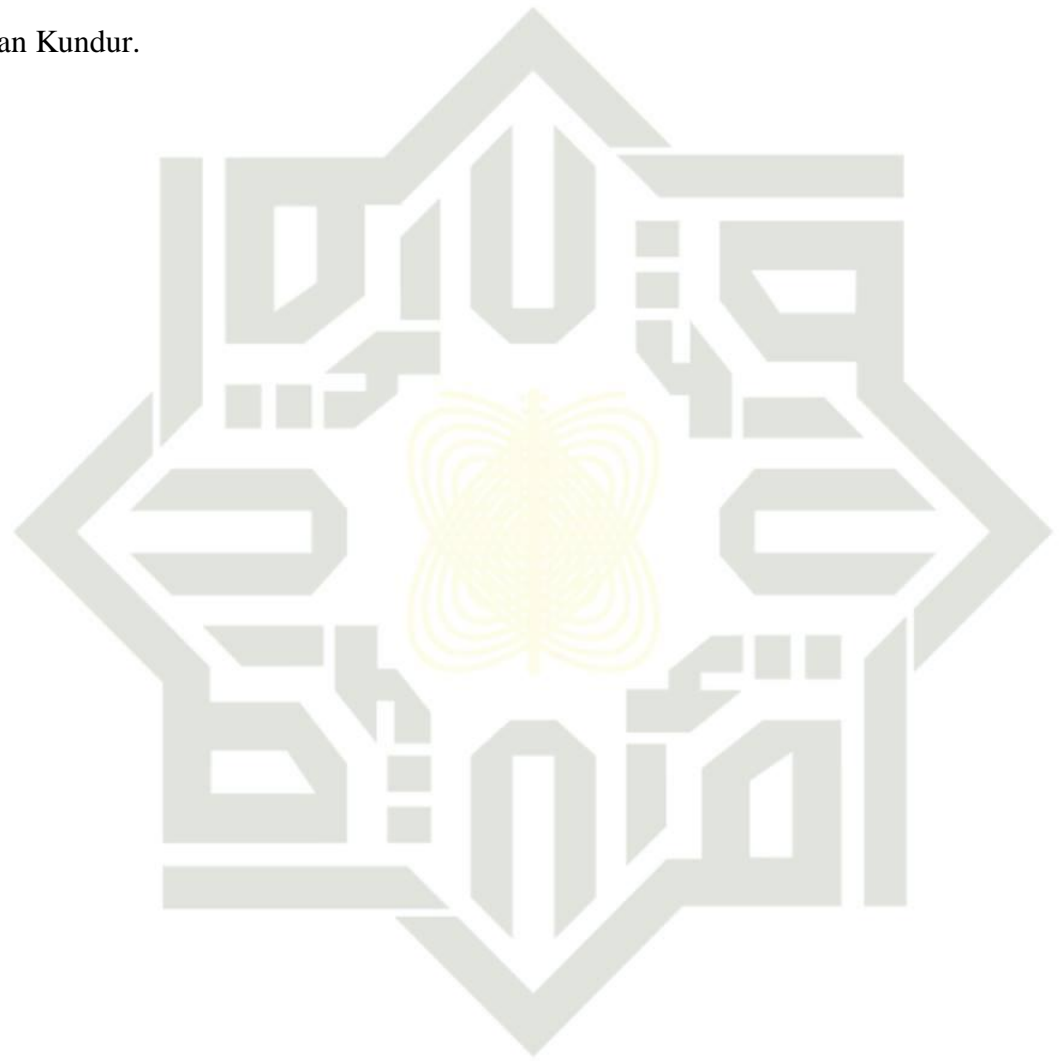
Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai pertimbangan dalam Pemekaran Kepulauan Kundur Kabupaten Karimun dan kepada pihak terkait agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah harus mampu memberikan keputusan yang terbaik tanpa adanya kepentingan atau paksaan dari pihak-pihak tertentu dan memprioritaskan hal-hal yang penting yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Untuk Pemerintah Kabupaten Karimun harus bisa mengatur pemerataan pembangunan dan ekonomi agar bisa meminimalkan masyarakat bekerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluar negeri dengan cara yang salah dan bisa mensejahterakan masyarakat dengan pemerataan pembangunan agar terciptanya lowongan pekerjaan dan terlebihnya juga agar terhindar dari tidak terpenuhi syarat pemekaran Kepulauan Kundur.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar dan Usman. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- H.A.W. Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Saryono (2010), *Metodologi Penelitian Kesehatan Penuntun Praktis Bagi Pemula*. Yogyakarta: Mitra Cendekia.
- Sekaran, Uma 2011. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sofair silaen dan Widiyono (2013). *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*
- Sujiyono (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Fitri Anggraini, 2016. *Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Studi Kelayakan Pemekaran Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
- Hidayat, 2016. *tentang Analisis faktor pendukung dan penghambat Kepulauan Kundur menjadi Kabupaten*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
- Rasy Puspitasari, 2014. *Tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi daerah baru (Studi Kelayakan Secara Administratif Kabupaten Indragiri*

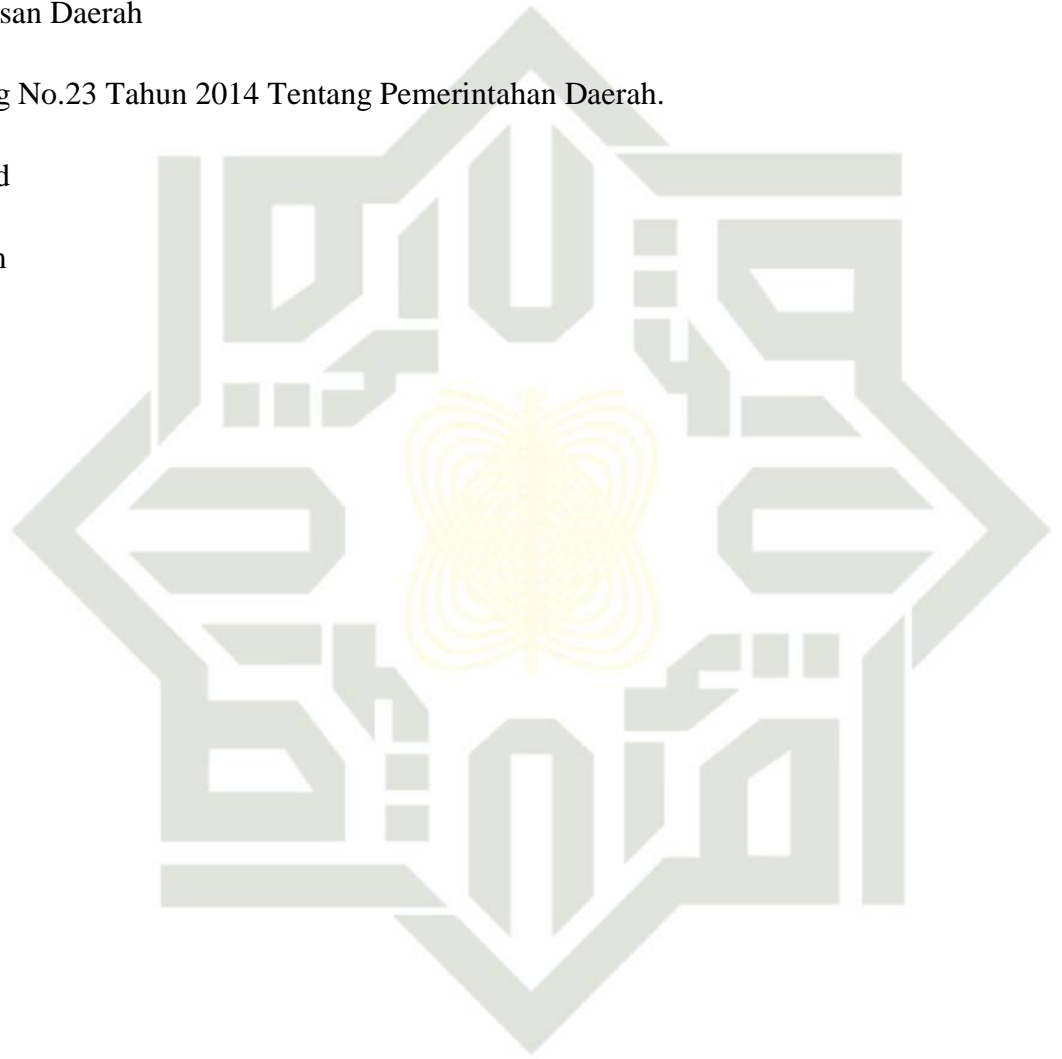
Selatan). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Daerah

Undang- Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Batamnews.co.id

Batamtoday.com



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Foto-foto Tentang Kegiatan di Lokasi Penelitian



Gambar 1. Peneliti setelah mewawancarai Bapak Huzrin Hood, SH (Tokoh Masyarakat, Pendiri Provinsi Kepulauan Riau).



Gambar 2. Peneliti saat mewawancarai Bapak Raja Bakhtiar, S.Ag, MM. (Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Peneliti saat mewawancarai Bapak Ahmad Yani, SE. (Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun).



Gambar 4. Peneliti setelah mewawancarai Bapak Ery Novaljadinata, S.STP, M.MP (Camat Kundur).



Gambar 5. Peneliti setelah mewawancarai Bapak Suhaidi (Bendahara Camat Kundur Utara).

- Hak Cipta
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jend. Sudirman-Poros Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau 29631
 Komplek Perkantoran Pemkab.Karimun Gedung Bukit Selembak Lantai II
 Email :

Tanjung Balai Karimun, 11 April 2019
 Kepada:

Nomor : 071/BAKESBANGPOL/IV/036/2019 Yth. - Ketua DPRD Kab. Karimun
 Sifat : Penting - Asisten I Setkab. Karimun
 Lampiran : 1 Lembar - Kepala Bagian Tata Pemerintahan
 Perihal : Penyampaian Kab. Karimun
 Rekomendasi Penelitian/ Riset

Di_ TEMPAT

Dalam rangka memperlancarkan pelaksanaan kegiatan, bersama ini terlampir disampaikan Rekomendasi Penelitian, Nomor: 071/BAKESBANGPOL/IV/036/2019. Tanggal 11 April 2019. Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama / Obyek : **HERRYZAL**
 NIM/Jurusan/ : 11575105589/ Administrasi Negara /S1
 Fakultas/Jenjang
 Judul : **"Analisis Faktor Penyebab Kepulauan Kundur Gagal Menjadi Daerah Otonom Baru"**

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya untuk dapat ditindaklanjuti diucapkan terima kasih

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN KARIMUN
 Kabid. Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

SUGIONO, S.Ag., M. M
 Pembina / IV, a, 1
 NIP. 19690305-199303 1 027

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Karimun di Tanjung Balai Karimun (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun;
3. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru;



Scanned with
 CamScanner

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jend. Sudirman-Poros Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau 29631
Komplek Perkantoran Pemkab. Karimun Gedung Bukit Selembak Lantai II
Email :

REKOMENDASI

Nomor: 071/BAKEBANGPOL/TV/036/2019

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 07).
 3. Peraturan Bupati Karimun Nomor : 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah.

Menimbang : Surat dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tanggal 18 Maret 2019.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARIMUN, memberikan Rekomendasi kepada:

- a. Nama/Obyek : **HERRYZAL**
- b. NIM/Jurusan/
Fakultas/Jenjang : 11575105589/ Administrasi Negara / Ekonomi dan Ilmu Sosial/ S1
- c. Untuk : Penelitian/Riset
- d. Judul : **"Analisis factor Penyebab Kepulauan Kundur Gagal Menjadi Daerah Otonom Baru"**
- e. Lokasi Kegiatan :
 - DPRD Kab. Karimun
 - Asisten I Setkab. Karimun
 - Bagian Tata Pemerintahan Kab. Karimun
- f. Waktu/
Lama Kegiatan :
 1. Selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
 2. Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada Pemerintah setempat.
 3. Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah setempat.
- g. Penanggungjawab
Kegiatan :
 - Dr. Mahmuzar , M.Hum

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Dibuat,di : Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal : 11 April 2019

a.n. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARIMUN**
Kabid. Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

SUGIONO, S.A., M. M
Pembina TV
NIP. 19690505 199303 1 027



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jend. Sudirman-Poros Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau 29631

Komplek Perkantoran Pemkab.Karimun Gedung Bukit Selembak Lantai II

Email :

REKOMENDASI

Nomor: 071/BAKEBANGPOL/IV/036/2019

Dasar

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 07).
3. Peraturan Bupati Karimun Nomor : 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah.

Menimbang

- : Surat dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tanggal 18 Maret 2019.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARIMUN, memberikan Rekomendasi kepada:

- a. Nama/Obyek : **HERRYZAL**
- b. NIM/Jurusan/
Fakultas/Jenjang : 11575105589/ Administrasi Negara / Ekonomi dan Ilmu Sosial/ SI
- c. Untuk : Penelitian/Riset
- d. Judul : **"Analisis faktor Penyebab Kepulauan Kunder Gagal Menjadi Daerah Otonom Baru"**
- e. Lokasi Kegiatan : Baperlitbang Kab. Karimun,Bapenda Kab. Karimun, BPS Kab. Karimun, Disdukcapil Kab. Karimun,Dinas Pertanian Kab. Karimun, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karimun, Badan Pengelola Keuangan dan Asct Daerah Kab. Karimun, Basarnas Kab. Karimun, PIDAM (Perusahaan daerah Air Minum) Tirta KarimunCabang Tanjung Batu, Puskesmas Tg. Batu, Tim Pembentukan Kab. Kunder, Polsek Kunder, Camat Kunder, Camat Kunder Barat, Camat Kunder Utara, Camat Belat, Camat Ungar, Camat Durai, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kelurahan Gading Sari, Desa Sungai Sebesi, Desa Sungai Ungar, Desa Lubuk, Kelurahan Sawang, Desa Sawang Laut, Desa Sawang Selatan, Desa Kunder, Desa Gemuruh, Kelurahan Tanjung Berlian Kota,Desa Tanjung Berlian Barat, Desa Sungai Ungar Utara, DesaTeluk Radang, Desa Perayun, Desa Telaga Tujuh, Desa Sanglar, Desa Semembang, Desa Tanjung Kilang, Desa Penarah, Desa Sebele, Desa Lebu, Desa Sungai Asam, Desa Degong, Desa Tebias, Kelurahan Alai, Desa Batu Limau, Desa Sungai Buluh, Desa Ngai, Kecamatan Durai
- f. Waktu/
Lama Kegiatan :
 1. Selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
 2. Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada Pemerintah setempat.
 3. Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah setempat.
- g. Penanggungjawab
Kegiatan : - Dr. Mahmuzar , M.Hum

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Dibuat di : Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal : 23 April 2019



Scanned with
CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jend. Sudirman-Poros Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau 29631
 Komplek Perkantoran Pemkab.Karimun Gedung Bukit Selembak Lantai II

Email :

Tanjung Balai Karimun, 23 April 2019

Kepada:

Nomor : 071/BAKESBANGPOL/IV/036/2019 Yth.
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 Lembar
 Perihal : Penyampaian
 Rekomendasi Penelitian/ Riset

Di
TEMPAT

Dalam rangka memperlancarkan pelaksanaan kegiatan, bersama ini terlampir disampaikan Rekomendasi Penelitian, Nomor: 071/BAKESBANGPOL/IV/036/2019. Tanggal 23 April 2019. Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama / Obyek : **HERRYZAL**
 NIM/Jurusan/ : 11575105589/ Administrasi Negara / Ekonomi dan Ilmu Sosial /SI
 Fakultas/Jenjang
 Judul : **"Analisis Faktor Penyebab Kepulauan Kundur Gagal Menjadi Daerah Otonom Baru"**

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya untuk dapat ditindaklanjuti diucapkan terima kasih

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARIMUN
SEKRETARIS,
H. RIZAL AIDI, S.Pd. MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19620720 198309 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Karimun di Tanjung Balai Karimun (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun;
3. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru;

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BADAN PEKERJA PEMBENTUKAN
KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR (BP2K3)**

SEKRETARIAT : JEND. SUDIRMAN 175 TANJUNGBATU KOTA KEC. KUNDUR
HP. 085272546120

Bank Riaukepri no. rek : 123-20-00301 a.n BP2K3
E mail : bp2k3_kundur@yahoo.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 17 /BP2K3/E/VII/2019

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Katwanto, SE
Jabatan : Sekretaris Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3)
Alamat : KM 14, Dusun II Sawang Selatan Kec. Kundur Barat Kab. Karimun
No. Telp/HP : 085272546120

Dengan ini memberikan keterangan bahwa :

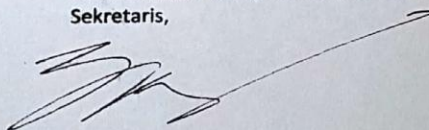
Nama : Herryzal
NIM : 11575105589
Jurusan : Administrasi Negara

Adalah benar, yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian, pengumpulan data dan informasi pada organisasi Badan Pekerja Pembentukan Kepulauan Kundur (BP2K3) tentang faktor penyebab Kepulauan Kundur gagal menjadi daerah otonom baru.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungbatu, 15 Juli 2019

A.n Ketua Badan Pekerja
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3)
Sekretaris,



KATWANTO, SE



Scanned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN KUNDUR**

Jalan Jend. Ahmad Yani Tanjung Batu Kundur 29662 Kep. Riau
Telepon/Faksimili (0779) 21379
email : Kantorcamatkundur.Umum@Gmail.Com

REKOMENDASI

Nomor : 071/KDR-UP/ 03 /V/2019

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun (Lembaga Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 7);
3. Peraturan Bupati Karimun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pemilihan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Kundur Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Karimun.

Menimbang :

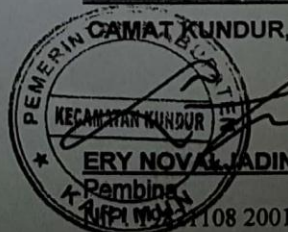
Surat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Karimun Nomor 071/BAKESBANGPOL/IV/036/2019 Tanggal, 23 April 2019 Perihal Penyampaian Rekomendasi Penelitian/Riset.

CAMAT KUNDUR, memberikan Rekomendasi kepada :

- a. Nama : HERRYZAL
- b. NIM / Jurusan/ Fakultas / Jenjang : 11575105589/Administrasi Negara/Ekonomi dan Ilmu Sosial/S1
- c. Untuk : Melakukan Penelitian/ Riset
- d. Judul Penelitian : **"Analisis Faktor Penyebab Kepulauan Kundur Gagal Menjadi Daerah Otonom Baru"**
- e. Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun
- f. Waktu/ Lama Kegiatan :
 1. Selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan;
 2. Sebelum melakukan Penelitian agar melapor kepada; Pemerintah (Kepala Desa / Lurah) setempat;
 3. Melaporkan hasil Penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan kepada Camat Kundur.
- g. Penanggung Jawab : Dr. Mahmuzar, M. Hum.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Tanjungbatu Kundur
Pada Tanggal : 24 Mei 2019



ERY NOVAL JADINATA, S. STP, M.MP.

1108 200112 1 001



Scanned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUESIONER

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEPULAUAN KUNDUR GAGAL MENJADI DAERAH OTONOM BARU

A. Petunjuk

1. Sebelum anda memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan dibawah ini, tulislah terlebih dahulu identitas anda
2. Berikan tanda centang (✓) pada kolom yang telah disediakan
3. Pilihlah jawaban yang menurut anda sesuai
4. Alternatif jawaban :
SB : Sangat Baik
B : Baik
KB : Kurang Baik
TB : Tidak Baik

Identitas Peneliti

Nama/NIM : Herryzal/11575102289
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Identitas Responden

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Pendidikan Terakhir :

No	Daftar Pertanyaan	Faktor Penyebab			
		SB	B	KB	TB
Persyaratan Dasar Kewilayahan					
1	Bagaimana Luas Wilayah Calon Kabupaten Kepulauan Kundur ?				
2	Bagaimana Jumlah Penduduk Calon Kabupaten Kepulauan Kundur?				
3	Bagaimana Batas-batas Wilayah Calon Kabupaten Kepulauan Kundur?				
4	Bagaimana Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Kepulauan Kundur?				
5	Bagaimana Usia Kecamatan yang mencakupi Calon Kabupaten Kepulauan Kundur?				

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah					
6	Bagaimana lokasi Ibukota calon Kabupaten Kepulauan Kundur?				
7	Bagaimana Kondisi Sumber Daya Air calon Kabupaten Kepulauan Kundur?				
8	Bagaimana Kerawanan Bencana di daerah calon Kabupaten Kepulauan Kundur?				
9	Bagaimana Kualitas Sumber Daya Manusia calon Kabupaten Kepulauan Kundur?				
10	Bagaimana Distribusi dan Kepadatan Penduduk calon Kabupaten Kepulauan Kundur?				
11	Bagaimana Tindak Kriminal yang berada di daerah calon Kabupaten Kepulauan Kundur?				
12	Bagaimana Konflik Sosial yang berada di daerah calon Kabupaten Kepulauan Kundur?				
13	Bagaimana Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum di daerah calon Kabupaten Kepulauan Kundur?				
14	Bagaimana Kohesivitas Sosial (<i>keinginan anggota kelompok sebagai satu kesatuan</i>) yang berada di daerah calon Kabupaten Kepulauan Kundur?				
15	Bagaimana Organisasi Masyarakat yang berada di daerah calon Kabupaten Kepulauan Kundur?				
16	Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi calon Kabupaten Kepulauan Kundur?				
17	Bagaimana Potensi Unggulan Daerah calon Kabupaten Kepulauan Kundur?				
18	Bagaimana Kapasitas Pendapatan Asli Daerah Induk Kabupaten Karimun?				
19	Bagaimana Potensi Pendapatan Asli Daerah Persiapan calon Kabupaten Kepulauan Kundur?				
20	Bagaimana Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berada di daerah calon Kabupaten Kepulauan Kundur?				
21	Bagaimana Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan di daerah calon Kabupaten Kepulauan Kundur?				
22	Bagaimana Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan di daerah calon Kabupaten Kepulauan Kundur?				
23	Bagaimana Aksesibilitas Pelayanan Dasar Infrastruktur di daerah calon Kabupaten Kepulauan Kundur?				
24	Bagaimana Jumlah Pegawai Negeri Sipil Negara di daerah Kabupaten Karimun?				

25	Bagaimana Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Persiapan calon Kabupaten Kepulauan Kundur?				
Persyaratan Administratif					
26	Bagaimana Dukungan Desa yang tergabung kedalam Calon Kabupaten Kepulauan Kundur yang memberikan keputusan musyawarah desa untuk menyatukan sikap mendukung pemekaran?				
27	Bagaimana Persetujuan DPRD Kabupaten dan Bupati dari Kabupaten Karimun terkait Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur?				
28	Bagaimana Persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur Kepulauan Riau terkait Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur?				

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara

Nama Informan

Jabatan

1. Apakah wilayah Kepulauan Kundur sudah mencukupi syarat Luas Wilayah Minimal untuk dijadikan sebuah Kabupaten?
2. Apakah Jumlah Penduduk sudah sesuai dengan wilayah efektif untuk dimekarkan?
3. Apakah sudah ada batasan-batasan wilayah yang jelas apabila Kepulauan Kundur dimekarkan?
4. Apakah Kepulauan Kundur sudah memenuhi syarat Cakupan Wilayah Minimal untuk sebuah Kabupaten Baru?
5. Apakah setiap kecamatan yang bakal menjadi wilayah Kepulauan Kundur sudah memenuhi Batas Usia Minimal Daerah?
6. Apakah wilayah Kepulauan Kundur sudah memenuhi atau melakukan penelitian tentang syarat parameter Geografi yang terdiri dari Lokasi Ibukota, Hidrologi (Kualitas Sumber Air), dan Kerawanan Bencana?
7. Apakah wilayah Kepulauan Kundur sudah memenuhi atau melakukan penelitian tentang syarat parameter Demografi yang terdiri dari kualitas Sumber Daya Manusia dan Distribusi Penduduk?
8. Apakah wilayah Kepulauan Kundur sudah memenuhi atau melakukan penelitian tentang syarat parameter Keamanan yang terdiri dari Tindakan Kriminal Umum dan Konflik Sosial yang sering terjadi dimasyarakat?
9. Apakah wilayah Kepulauan Kundur sudah memenuhi atau melakukan penelitian tentang syarat parameter Sosial Politik, Adat, dan Tradisi yang terdiri dari Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum, Kohesivitas Sosial, dan Organisasi Kemasyarakatan?
10. Apakah wilayah Kepulauan Kundur sudah memenuhi atau melakukan penelitian tentang syarat parameter Potensi Ekonomi yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Unggulan Daerah?
11. Apakah wilayah Kepulauan Kundur sudah memenuhi atau melakukan penelitian tentang syarat parameter Keuangan Daerah yang terdiri dari Kapasitas Pendapatan Asli Daerah Induk, Potensi Pendapatan Asli Calon Daerah Persiapan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah?
12. Apakah wilayah Kepulauan Kundur sudah memenuhi atau melakukan penelitian tentang syarat parameter Kemampuan Penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri dari Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan, Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan, Aksesibilitas Pelayanan Dasar Infrastruktur, Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah Induk dan, Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Persiapan?

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Apakah seluruh desa yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Kundur sudah memberikan Keputusan Musyawarah Desa yang menyatukan sikap mendukung dan bergabung didalam wilayah Kepulauan Kundur untuk dimekarkan?
14. Apakah Pemekaran Kepulauan Kundur sudah memenuhi atau memiliki Persetujuan dari DPRD Kabupaten dan Persetujuan Bupati dari Kabupaten Induk?
15. Apakah Pemekaran Kepulauan Kundur sudah memenuhi atau memiliki Persetujuan dari DPRD Provinsi dan Persetujuan Gubernur Kepulauan Riau?
16. Apakah Kepulauan Kundur layak menjadi Daerah Otonom Baru di Provinsi Kepulauan Riau?
17. Apa faktor Penyebab Kepulauan Kundur gagal menjadi Dearah Otonom Baru?



Scanned with
CamScanner



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2208/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 18 Maret 2019 M
11 Rajab 1440 H

Kepada
Yth. Kapala Kantor
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Karimun
di Tempat

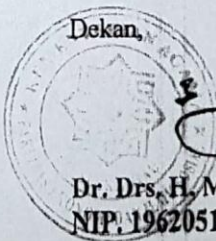
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Herryzal
NIM. : 11575105589
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Faktor Penyebab Kepulauan Kundur Gagal Menjadi Daerah
Otonom Baru" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan
bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Saïd HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



Scanned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BADAN PEKERJA PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR (BP2K3)

SEKRETARIAT : JL. JEND. SUDIRMAN. NO. 30 TANJUNGBATU KOTA

SURAT KEPUTUSAN BADAN PEKERJA PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR (BP2K3) NOMOR 01/BP2K3/V/2011

TENTANG SUSUNAN PENGURUS BADAN PEKERJA PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR (BP2K3)

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | : a. Bahwa berdasarkan aspirasi yang berkembang dan keinginan masyarakat Kecamatan Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat, Moro dan Durai untuk membentuk sebuah daerah otonom baru.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas dan untuk melaksanakan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Kundur perlu dibentuk Struktur Badan Pekerja Pembentukan kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) secara lengkap. |
| Mengingat | : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 5 ayat 1, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, pasal 20 dan pasal 21.
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
e. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 181, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 107, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4880).
f. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. |




Scanned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur pada tanggal 29 Mei 2011 di Balai Sri Gading Tanjungbatu tentang Pembentukan Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3).
- Menetapkan : **Memutuskan**
- Pertama : Susunan Pengurus Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam surat keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan sesuai dengan bidang dan program serta tujuan yang telah diputuskan dalam musyawarah pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungbatu
Pada Tanggal : 30 Mei 2011


Badan Pekerja Pembentukan Kab. Kepulauan Kundur (BP2K3)
Ketua,


IHSAN MUHARAL, SH

Sekretaris,


KATWANTO, SE

Mengetahui,
Ketua Dewan Penggerak Utama
Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur


H. HUZRIN HOOD, SH

Lampiran :

Nomor : 01/BP2K3/V/2011 Tanggal 30 Mei 2011
Tentang : Susunan Pengurus Badan Pekerja Pembentukan
: Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3)

**SUSUNAN PENGURUS
BADAN PEKERJA PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR (BP2K3)**

I. DEWAN KEHORMATAN

1	Drs. H. MUHAMMAD SANI
2	DR. SUHAJAR DIANTORO
3	HARDI SELAMAT HOOD

II. DEWAN PENYANTUN

NO	NAMA	JABATAN
1	H. WACHID USMAN	Ketua
2	HENGKY SURYAWAN	Anggota
3	Drs. ERIZAL HOOD	Anggota
4	ISDIANTO, S.Sos, M.Si	Anggota
5	Drs. ASTURULLAH AZIZ, M.Sc	Anggota
6	Drs. YATIM MUSTAFA, M.Pd	Anggota
7	Drs. SAID JAAFAR	Anggota
8	M. YUSUF SIRAT	Anggota
9	JOKO NUGROHO, ST	Anggota
10	H. ERIAWANTO, SH	Anggota
12	HUSNIZAR HOOD	Anggota
13	HJ. SURAYA	Anggota
14	ANDI LOLO	Anggota
15	Dr. JUSRIZAL	Anggota
16	RAJA BAKHTIAR, S.Ag, MM	Anggota
17	H. MUHAMMAD ASYURA, SE, MM	Anggota
18	RASNO	Anggota
19	SYAHRIL, SS, MM	Anggota
20	H. MUHAMMAD TAUFIQ, SH	Anggota
21	H. ZAMHUR, SH	Anggota
22	Drs. ANWAR HASAN	Anggota
23	SUHARSONO, S.IP	Anggota
24	AZMI	Anggota
25	ZULFIKAR	Anggota
26	BAKTI LUBIS	Anggota
27	ABDUL HAFID	Anggota
28	JAMALLUDIN SAHARI, SH	Anggota
29	AMAT TANTOSO	Anggota

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

III. DEWAN PENASEHAT / PENGGERAK UTAMA

NO	NAMA	JABATAN
1	H. HUZRIN HOOD, SH	Ketua
2	Ing. ISKANDARSYAH	Anggota
3	Drs. H. ABDUL MALIK, MM	Anggota
4	H. KAHAR YUS	Anggota
5	H. MUHAMMAD BUANG	Anggota
6	Drs. H. RAZALI JAYA	Anggota
7	H. ARIFIN ZAINUDDIN	Anggota
8	H. ERZANTO	Anggota
9	DANI FATONI	Anggota
10	H. AMBOK SALIMA	Anggota
12	H. ABDUL MANAN ASNGARI	Anggota
13	H. ZAINAL	Anggota
14	H.KIMYARI	Anggota
15	H. MUHAMMAD RASYID TAB	Anggota
16	H. MUNZIR USMAN	Anggota
17	H. ALWI HASAN	Anggota
18	H. T SAID YAHYA	Anggota
19	H. UMARULLAH	Anggota
20	Drs. SAID SUHIL AHMAD, M.Pd	Anggota
21	R. AGUSTIARMAN	Anggota
22	Drs. RAHMAN DAUD	Anggota
23	SUPARJO	Anggota
24	BILTAR ATLAS, BA	Anggota
25	Drs. M. SAHIR, M.Pd	Anggota
26	TUKIJAN SARPAN	Anggota
27	R. ISYAM AZWAR	Anggota
28	Ir. JOKO YUGOPUTRA	Anggota
29	H. ABIZA	Anggota
30	H. RASYID. K	Anggota
31	H. MAHIDIN	Anggota
32	H. RAJA MUHAMMAD	Anggota
33	ZAHARI, DN	Anggota
34	M. SIRAJD	Anggota
35	H. SAMIN	Anggota
36	H. MUHAMMAD SAID	Anggota
37	H. MUHAMMAD THAMRIN	Anggota
38	H. BAHAR	Anggota
39	HERIYANTO	Anggota
40	H. ABDUL MURAD	Anggota
41	H. ABDUL MANAF RIBAI	Anggota
42	SUWITO ALAM	Anggota
43	ARIESAPUTRA, SH, MH	Anggota
44	SUANA	Anggota
45	ATAN CIK	Anggota
46	Drs. H. A. ANAS BADRUN	Anggota
47	H. HAMZAH	Anggota
48	HASYIM IBRAHIM	Anggota
49	ABDUL BAHAR	Anggota
50	H. SYAMSUDIN	Anggota
51	BUJANG. K	Anggota
52	H. RUBAIS	Anggota
53	M. TAHER	Anggota
54	KARIM NYAT	Anggota

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IV. BADAN PENGURUS

NO	NAMA	JABATAN
1	IHSAN MUHARAL, SH	Ketua Umum
2	Drs. MUHAMMAD NASIR	Ketua I
3	ZULKARYANTO	Ketua II
4	ALIMID, S.Sos	Ketua III
5	M. HAFIDL ZAWAWI, S.Ag, M.MPd	Ketua IV
6	Drs. MUHAMMAD NASIR / Moro	Ketua V
7	ASWANDI, SE	Ketua VI
8	SAHIR DJALIL	Ketua VII
9	ANDI FARID SULIANTO	Ketua VIII
1	KATWANTO, SE	Sekretaris Umum
2	AGUSTAMAR	Sekretaris I
3	AHMAD SULTON, SP	Sekretaris II
4	SUYANTO	Sekretaris III
5	SUSANTO, S.Sos	Sekretaris IV
6	IWAN TRISNAWAN	Sekretaris V
7	ANTON SAPUTRA	Sekretaris VI
8	ELVEN CHALIS, SE, Ak	Sekretaris VII
9	ANDI SUTRISNO	Sekretaris VIII
1	DARMAWAN, S.AP	Bendahara Umum
2	M. NUR ALAMSYAH, BA	Bendahara I
3	ABDUL SATAR	Bendahara II

BIDANG-BIDANG :

1. BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI

NO	NAMA	JABATAN
1	PENDI IRANO	Ketua
2	M. AZWAN	Anggota
3	SUDARKO	Anggota
4	ERI SUANDI	Anggota
5	EDI KURNIADI	Anggota
6	AGUSTINI	Anggota
7	THOMY RIFANOR	Anggota
8	JR. LANNY PRIHARDI	Anggota
9	GATOT ARIFianto	Anggota
10	ZULKARNAIN, S.Pd.I	Anggota

2. BIDANG PENDATAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH

NO	NAMA	JABATAN
1	H. WIJOYO KUSUMO, S.Psi, M.Pub	Ketua
2	FAUZAN AZHIMA, SP	Anggota
3	MARDIANTO, ST	Anggota
4	ANDI KURNIAWAN, ST	Anggota
5	EDWARD RAFLES LT	Anggota
6	SURYADI, S.Pd	Anggota
7	SUPARWAN, SE	Anggota
8	MUSLIM	Anggota
9	DIAN GUSNAIRIN, S.Sos	Anggota
10	MARYONO	Anggota
11	ERIZAL, ST	Anggota
12	HASANUDDIN, SE	Anggota

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. BIDANG HUKUM DAN ADVOKASI

NO	NAMA	JABATAN
1	KADIR, SH	Ketua
2	RAJA JURAIMI, SH	Anggota
3	DARMAWAN, SH	Anggota
4	KARINA ABIM, SH	Anggota
5	ANJI TRISNO, SH	Anggota
6	SUTARNO, SH	Anggota
7	MAULIRIAN BAMAR	Anggota

4. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN ANTAR LEMBAGA

NO	NAMA	JABATAN
1	ISMAIL	Ketua
2	ZAINAL AFRIDIN	Anggota
3	Drs. MUHAMMAD ZEN	Anggota
4	SUTOYO	Anggota
5	Drs. ISWANDI	Anggota
6	MUHAMMAD TAHIR	Anggota
7	ATAN KOBEL	Anggota
8	ABDUL MUIS	Anggota
9	MUSREM	Anggota
10	INAWATI	Anggota
11	ZAINAL ANUAR	Anggota
12	AMRAN	Anggota
13	HASMI	Anggota

5. BIDANG PERLENGKAPAN DAN LOGISTIK

NO	NAMA	JABATAN
1	DAHRIZUL	Ketua
2	JONI ARDI	Anggota
3	ABDUL KAHAR	Anggota
4	RUDI SUCIPTO	Anggota
5	DEDIE DARMADIE	Anggota
6	AMINAH	Anggota
7	ELLY SURYANA	Anggota
8	SUPRIATIN	Anggota
9	IDRIS	Anggota
10	NAZARRUDIN	Anggota
11	SUPIANTO	Anggota
12	RUBIANTO	Anggota
13	ASEP AFANDI	Anggota
14	SUPRIYANTO	Anggota

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. BIDANG PENGGERAKAN MASSA

NO	NAMA	JABATAN
1	MUHAMMAD SUBIHAN	Ketua
2	AHMAD IBRAHIM	Anggota
3	ZULKARNAIN, SE	Anggota
4	JOKO SUSILO	Anggota
5	SALIM	Anggota
6	ABDUL GANI	Anggota
7	ISA ANSYARI LUBIS	Anggota
8	MUHAMMAD MASNYUR	Anggota
9	ZAINUDDIN	Anggota
10	ZULFAN, A.Md	Anggota
11	DEDI SAPUTRA	Anggota
12	AZWAR	Anggota
13	RUSLAN	Anggota
14	LATINURLI, A.Md	Anggota
15	KHAIRI	Anggota
16	BAHARRUDIN	Anggota
17	ARISUDIN	Anggota
18	IKHA HARIS	Anggota
19	GUNAWAN	Anggota
20	MARLIUS	Anggota
21	SYAFIAR BATUBARA	Anggota
22	M. TAHIR	Anggota
23	ABDUL MUIN	Anggota
24	RUSTAM	Anggota
25	ABDUL MAJID	Anggota
26	SUPRIYADI	Anggota
27	HERI	Anggota
28	HAIRUN	Anggota
29	EDDY	Anggota

7. BIDANG PENDANAAN

NO	NAMA	JABATAN
1	ANDI AKBAR	Ketua
2	SUNG NAM	Anggota
3	ASIONG / EFFENDI	Anggota
4	AKENG / EFFENDI	Anggota
5	MARTIN LESMANA, SE	Anggota
6	INDRATAMA	Anggota
7	IRVAN SUCI IRAWAN	Anggota
8	A CEN	Anggota
9	ANDI NURUK D MAKITA	Anggota
10	SURBAINI	Anggota
11	ABUDIN	Anggota

8. SOSIALISASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

NO	NAMA	JABATAN
1	ZULHASNUL, ST	Ketua
2	BAMBANG HARDI JUSNO, SH	Anggota
3	JONI SANDRA	Anggota
4	M. SYUKUR	Anggota
5	SUNARSO	Anggota
6	FITRI AKBAR, SH	Anggota
7	RUDI.RUSDIYANSYAH	Anggota
8	FARIZAL	Anggota

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. BIDANG TRANSPORTASI

NO	NAMA	JABATAN
1	RAJA WAHYUDI	Ketua
2	HEPI LOLIANDI	Anggota
3	M. ENDI RAZALI	Anggota
4	ABDUL RAHIM	Anggota
5	EDI SUSILA	Anggota
6	EDI JAYA	Anggota
7	ABDUL HALIM	Anggota
8	PURWA HADI PUTRA SANTOSO	Anggota
9	HENDRIE ALI	Anggota

10. BIDANG DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

NO	NAMA	JABATAN
1	HAZWAN, SH	Ketua
2	KAMED RIYADI, S.PI	Anggota
3	ZURIANTIAS	Anggota
4	SUBAHRIZAL WAHYUDI	Anggota
5	WIRMAN MANALU	Anggota
6	IMAM SUKARNO, S.Ag	Anggota
7	KHAIRIL ANWAR	Anggota
8	JHON HARDINATA	Anggota

Ditetapkan di : Tanjungbatu
Pada Tanggal : 30 Mei 2011

Badan Pekerja Pembentukan Kab. Kepulauan Kundur (BP2K3)

Ketua,

Sekretaris,

IHSAN MOHARAL, SH

KATWANTO, SE

Mengetahui,

Ketua Dewan Penggerak Utama

Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur

H. HUZRIN HOOD, SH

KELENGKAPAN DATA ADMINISTRATIF, TEKNIS, DAN FISIK KEWILAYAHAN YANG PERLU DILENGKAPI DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KAB. KEPULAUAN KUNDUR, PEMEKARAN WILAYAH KAB. KARIMUN, DI PROV. KEPULAUAN RIAU.

Kelengkapan Sesuai PP 78/2007

Edisi :

Ada Belum Ket

I. Persyaratan Administratif

1.	Aspirasi sebagian besar Masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Desa, dan atau Forum Komunikasi Kelurahan (FKK) untuk Kelurahan, lebih 2/3 dari jumlah BPD/FKK. - Surat dukungan dari BPD, LPM, OKP, Ormas, dan LSM	✓	Aspirasi belum sesuai PP 78/2007, karena belum merupakan keputusan.
2.	Keputusan DPRD Kabupaten hasil Sidang Paripurna, yang memuat tentang :		Foto copy Cakupan wilayah Kecamatan pada Kpts DPRD dengan Bupati tidak sesuai yaitu : DPRD 5 Kec., dan Bupati 6 Kec (daftar hadir terlampir)
	a. Persetujuan Nama calon DOB	✓	No. 08 Th 2012 tgl. 31 Mei 2012
	b. Persetujuan penetapan lokasi Ibukota calon DOB.	✓	No. 08 Th 2012 tgl. 31 Mei 2012 (ibukota di Kec. Kundur)
	c. Persetujuan pelepasan kecamatan yang menjadi cakupan wilayah calon DOB.	✓	No. 08 Th 2012 tgl. 31 Mei 2012 (5 Kec yaitu : Kec. Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat, Durai, dan Maro)
	d. Persetujuan pemberian Hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan DOB selama 2 thn berturut-turut (agar disebutkan besarnya nominal Rp.)	✓	
	e. Persetujuan dukungan dana untuk penyelenggaraan Pilkada pertama kali DOB. (agar disebutkan besarnya nominal Rp.)	✓	
	f. Persetujuan penyerahan kekayaan Daerah yang dimiliki berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, personil, hutang-piutang, dan dokumen yang digunakan di calon DOB.	✓	
	g. Persetujuan penyerahan sarana dan prasarana perkantoran yang digunakan oleh calon DOB untuk penyelenggaraan pemerintahan.	✓	
3.	Keputusan Bupati yang memuat tentang :		Foto copy Cakupan wilayah Kecamatan pada Kpts DPRD dengan Bupati tidak sesuai yaitu : DPRD 5 Kec., dan Bupati 6 Kec.
	a. Persetujuan Nama calon DOB	✓	No. 199 Thn 2012 tgl. 14 Nop 2012
	b. Persetujuan penetapan lokasi ibukota calon DOB.	✓	No. 199 Thn 2012 tgl. 14 Nop 2012 (ibukota di Kec. Kundur)
	c. Persetujuan pelepasan kecamatan yang menjadi cakupan wilayah calon DOB.	✓	No. 199 Thn 2012 tgl. 14 Nop 2012 (6 Kec yaitu : Kec. Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat, Durai, Ungar, dan Kec. Belat)
	d. Persetujuan pemberian Hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan DOB selama 2 thn berturut-turut, (agar disebutkan besarnya nominal Rp.)	✓	No. 199 Thn 2012 tgl. 14 Nop 2012 (Rp.2 Milyar/tahun selama 2 Tahun berturut2).
	e. Persetujuan dukungan dana untuk penyelenggaraan Pilkada pertama kali DOB. (agar disebutkan besarnya nominal Rp.)	✓	No. 199 Thn 2012 tgl. 14 Nop 2012 (Rp.2 Milyar untuk Pilkada pertama kali).
	f. Persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, personil, hitang-piutang, dan dokumen yang digunakan di calon DOB.	✓	No. 199 Thn 2012 tgl. 14 Nop 2012
	g. Persetujuan penyerahan sarana dan prasarana perkantoran yang digunakan oleh calon DOB untuk penyelenggaraan pemerintahan.	✓	No. 199 Thn 2012 tgl. 14 Nop 2012
4.	Surat Bupati kepada Gubernur Perihal Usul persetujuan	✓	No. 100/Pem/190/XI/2012 tgl. 14 Nop 2012 (foto copy)
5.	Keputusan DPRD Prov. Hasil Sidang Paripurna yang memuat tentang :		Foto copy
	a. Persetujuan nama calon DOB.	✓	No. 28/Kpts-DPRD/160/XII/12 tgl. 26 Des 2012
	b. Persetujuan penetapan lokasi ibukota calon DOB	✓	No. 28/Kpts-DPRD/160/XII/12 tgl. 26 Des 2012 Ibukota di Kec.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Persetujuan penetapan Cakupan wilayah kecamatan yang masuk dalam calon DOB	✓		Kundur) No. 28/Kpts-DPRD/160/XII/12 tgl. 26 Des 2012 (7 Kecamatan yaitu : Kec. Kundur, Kundur Barat, Kundur Utara, Durai, Ungar, Belat, dan Kec. Maro)
d. Persetujuan pemberian bantuan dukungan dana untuk penye- lenggaraan pemerintahan DOB selama 2 tahun berturut-turut (agar disebutkan besarnya nominal Rp.)		✓	
e. Persetujuan pemberian dukungan dana untuk penyelenggaraan Pilkada pertama kali DOB. (agar disebutkan nominal Rp.)		✓	
f. Persetujuan pemindahan personil dari Provinsi		✓	
6. Keputusan Gubernur yang memuat tentang :			Foto copy
a. Persetujuan nama calon DOB	✓		No. 424 Thn 2013 tgl. 11 April 2013
b. Persetujuan penetapan lokasi ibukota calon DOB	✓		No. 424 Thn 2013 tgl. 11 April 2013 (ibukota di Kec. Kundur)
c. Persetujuan penetapan Cakupan wilayah kecamatan yang masuk dalam calon DOB	✓		No. 424 Thn 2013 tgl. 11 April 2013 (6 Kecamatan yaitu : Kec. Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat, Durai, Ungar, dan Kec. Belat).
d. Persetujuan pemberian bantuan dukungan dana untuk penye- lenggaraan pemerintahan DOB selama 2 tahun berturut-turut. (agar disebutkan besarnya nominal Rp.)	✓		No. 424 Thn 2013 tgl. 11 April 2013 (Rp.3 Milyar/tahun selama 2 Tahun berturut2).
e. Persetujuan pemberian dukungan dana untuk penyelenggaraan Pilkada pertama kali DOB. (agar disebutkan nominal Rp.)	✓		No. 424 Thn 2013 tgl. 11 April 2013 (Rp.2 Milyar untuk Pilkada pertama kali).
f. Persetujuan pemindahan personil dari Provinsi	✓		No. 424 Thn 2013 tgl. 11 April 2013
7. Surat Gubernur kepada Mendagri Perihal Usul persetujuan	✓		No. 087/Kdh Kepri.135/4.13 tgl. 12 April 2013. (foto copy)
II. Persyaratan Teknis (dukungan data)			
8. Kajian Daerah oleh Pemerintah Kabupaten	✓		Kajian belum sempurna, karena dalam kajian belum memasuk- kan perbandingan antara Kab. Induk yang berada di wilayah provinsi Kepri.
9. Buku Provinsi dalam angka terbitan tahun terakhir		✓	
10. Buku PDRB terbitan tahun terakhir untuk semua kabupaten yang ada di wilayah provinsi		✓	
11. Buku ringkasan APBD 3 tahun terakhir untuk semua kabupaten yang ada di wilayah provinsi		✓	
12. Buku kabupaten/kota dalam angka terbitan tahun terakhir untuk semua kab/kota yang ada di wilayah provinsi		✓	
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota		✓	
14. Potensi masing-masing kecamatan/profil calon kabupaten		✓	
15. Monografi masing-masing kecamatan		✓	
16. Formulir Isian Data Kelengkapan Calon DOB (diisi oleh Pem Kab yang ditanda tangani oleh Bupati dan Ketua DPRD Kab.) dan Blanko Isian.		✓	
III. Persyaratan Fisik Kewilayahan (dukungan data)			
17. Daftar nama pulau		✓	
18. Undang-Undang pembentukan kabupaten induk		✓	
19. PP/PERDA Kab. Induk tentang Pembentukan Kecamatan		✓	
20. Peta Wilayah Kab/Kota akan dibentuk yang telah diligalisir oleh Kab./Kota yang berbatasan dengan daerah lain, dan Peta Wilayah kabupaten induk.	✓		Peta dari BIG Thn 2013 : - Peta calon Kab Kundur Skala 1 : 100.000, - Peta Kab. Karimur pasca mekar Skala 1 : 175.000 - Peta Kab. Karimun (induk) skala 1 : 175.000 (peta belum tanda tangan Bupati/ Ketua DPRD perbatasan).
21. Bukti kepemilikan yang syah berupa dokumen bangunan dan lahan untuk Kantor Kepala Daerah, Kantor DPRD, dan Kantor Perangkat Daerah, untuk calon Kantor Kab. baru		✓	
22. Rencana Tata Ruang Wilayah/Provinsi/Kabupaten Induk.		✓	

Catatan :



BUPATI KARIMUN

Tanjung Balai Karimun, 30 April 2012

Nomor : 100/Pem/IV/59/2012
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Pemekaran
Kabupaten Kepulauan Kundur**

Kepada :
Yth. Bapak Gubernur
Kepulauan Riau
di - **Tanjung Pinang**

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah dan surat dari BP2K3 nomor : 33/BP2K3/X/2011 perihal Penyampaian Aspirasi.

Sehubungan dengan hal diatas, Bupati Karimun merekomendasikan dan menyetujui Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Letak Ibukota Kabupaten Kepulauan Kundur berlokasi di wilayah Kecamatan Kundur.
2. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Kundur terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dengan luas masing-masing Kecamatan sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Luas Wilayah Km ²		Jumlah
		Darat	Laut	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a.	Kundur	34,30	449,93	484,23
b.	Kundur Utara	29,50	509,15	538,65
c.	Kundur Barat	21,70	267,12	288,82
d.	Durai	52	1.480,54	1.532,54
e.	Moro	1.166,80	1.668,44	2.835,24
Jumlah		1.304,3	4.375,18	5.679,48

3. Dari 5 (lima) Kecamatan yang diusulkan oleh Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) dalam rencana pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur, untuk Kecamatan Moro masih perlu dipertimbangkan berdasarkan surat keputusan hasil musyawarah masyarakat Kecamatan Moro pada tanggal 8 Nopember 2011, dimana masyarakat Kecamatan Moro tetap ingin berada dibawah naungan Kabupaten Karimun.

Jalan Jenderal Sudirman, Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos. 29631

Telp.(0777) 7366010, 7366111 Fax. (0777) 7366112

Website : <http://www.kab-karimun.go.id>



Scanned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Untuk memenuhi syarat fisik kewilayahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur menunggu pengesahan Peraturan Daerah Pemekaran Kecamatan sehingga masing-masing syarat tersebut untuk Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran terpenuhi.
5. Peta rencana pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur (terlampir).

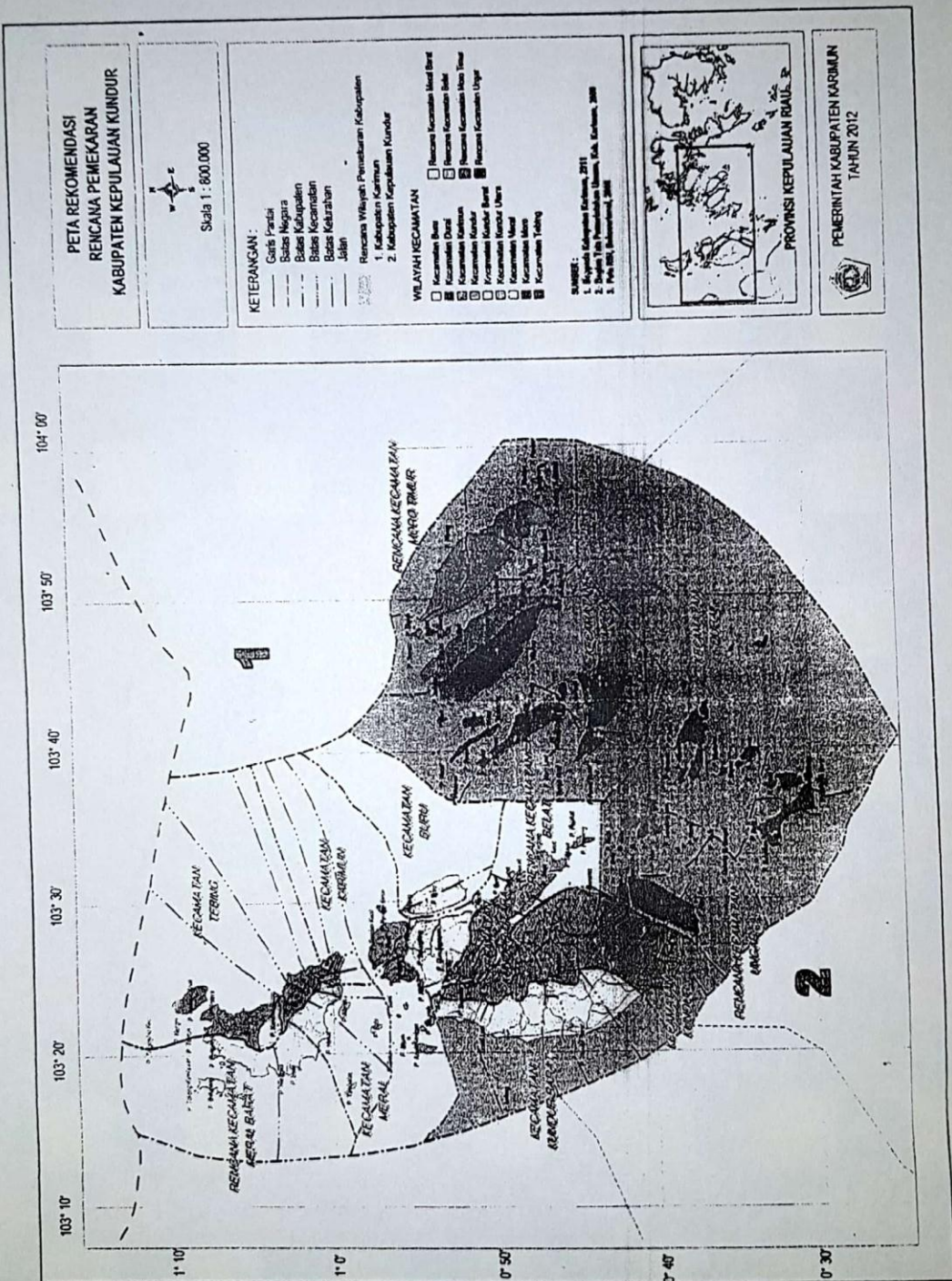
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas pertimbangannya diucapkan terima kasih.



Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Karimun
2. Yth. Wakil Bupati Karimun
- ③ Yth. Ketua Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur
4. Arsip

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BUPATI KARIMUN

Tanjung Balai Karimun, 19 Nopember 2012

Nomor : 100/Pem/190/XI/2012
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian SK Persetujuan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kundur**

Kepada :
Yth. Bapak Gubernur Propinsi Kepulauan Riau

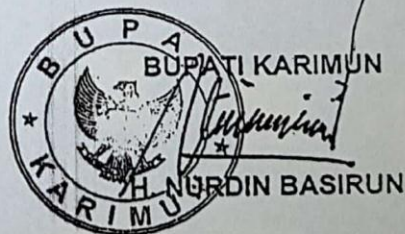
di - Tanjung Pinang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Bapak Gubernur Nomor : 125/KdhKepri.135.5/5.12 tanggal 22 Mei 2012 Perihal Rekomendasi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur, dengan ini kami sampaikan Surat Keputusan Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Kundur, dilengkapi dengan lampiran Tim Kajian Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Surat ini juga meralat dari pada Surat Rekomendasi Bupati Nomor : 100/Pem/IV/59/2012 tanggal 30 April 2012 perihal seperti diatas (jumlah Kecamatan dan Peta Wilayah Sementara).

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan : disampaikan kepada,

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Karimun
2. Arslp.



Scanned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BUPATI KARIMUN

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 199 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU (DOB)
KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) serta Pasal 5 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kundur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah



Scanned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan



Scanned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

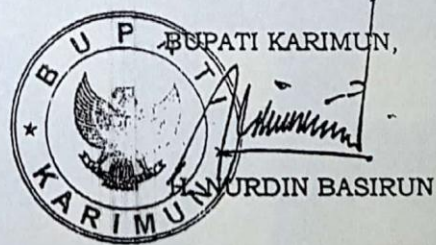
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU (DOB) KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR.
- KESATU : Menyetujui Nama Calon Daerah Otonom Baru (DOB) yaitu dengan nama Kabupaten Kepulauan Kundur;
- KEDUA : Menyetujui lokasi Ibu Kota Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kundur yaitu di Kecamatan Kundur ;
- KETIGA : Menyetujui cakupan wilayah Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kundur yaitu Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Durai, Kecamatan Ungar dan Kecamatan Belat (Peta wilayah Administrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini);
- KEEMPAT : Menyetujui pemberian hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kundur selama 2 tahun berturut-turut sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) per tahun;
- KELIMA : Menyetujui dukungan dana untuk penyelenggaraan Pilkada pertama kali Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kundur sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- KEENAM : Menyetujui penyerahan sebagian Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun baik bergerak maupun tidak bergerak, personil, hutang piutang dan dokumen yang digunakan di calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kundur;
- KETUJUH : Menyetujui penyerahan Sarana dan Prasarana perkantoran yang digunakan oleh calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kundur untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun.
pada tanggal 14 Nopember 2012



PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Jalan Canggai Putri, Telp. (0777) 323837 Fax. (0777) 328757
e-mail : dprdkarimun@telkom.net
TEBING - KARIMUN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 08 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN TERHADAP USULAN PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diterimanya aspirasi dari Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun perihal permohonan rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur, maka perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun;
 - b. bahwa berdasarkan surat Bupati Karimun Nomor : 100/Pem/IV/59/2012 tanggal 30 April 2012 Perihal Rekomendasi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun perlu kiranya menetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah berkali-kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);



Scanned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berkali-kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Pembentukan Calon Kabupaten Kepulauan Kundur sebagai Pemekaran dari Kabupaten Karimun sesuai dengan pandangan Komisi A dan pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun dan aspirasi dari Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Cakupan Wilayah Kabupaten Kepulauan Kundur dari Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yang terdiri dari :
- a. Kecamatan Kundur
 - b. Kecamatan Kundur Utara
 - c. Kecamatan Kundur Barat
 - d. Kecamatan Durai dan
 - e. Kecamatan Moro
- KETIGA** : Dari 5 (lima) Kecamatan yang diusulkan oleh Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) dalam rencana Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur, untuk dapat mempertimbangkan seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- KEEMPAT** : Calon Ibukota Kabupaten Kepulauan Kundur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berada di Kecamatan Kundur.
- KELIMA** : Mekanisme Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur sebagai Pemekaran dari Kabupaten Karimun harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
- KEENAM** : Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur harus memenuhi persyaratan administrasi teknis dan fisik kewilayahan melalui tahapan-tahapan yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan dan melakukan kajian potensi daerah bagi daerah yang akan dimekarkan dengan melibatkan tenaga ahli.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
Pada Tanggal 31 Mei 2012
10 Rajab 1433 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN

Ketua,

R. BAKHTIAR, M.M



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Pulau Dompok-Tanjungpinang

Tanjungpinang, 30 September 2013

Nomor : 449/188/ADM-PUM/IX/2013
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Fasilitasi Penandatanganan Peta Wilayah Calon DOB.**

Kepada Yth. :
GUBERNUR RIAU

di-

PEKANBARU

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Karimun Nomor 100/PEM/118/IX/2013 Tanggal 24 September 2013, Perihal Fasilitasi Penandatanganan Batas Wilayah Pemekaran Calon Kabupaten Kepulauan Kundur, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Provinsi Kepulauan Riau telah menyampaikan usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kundur yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Karimun kepada Menteri Dalam Negeri dan DPR RI.
2. Terhadap Evaluasi DOB yang dilakukan Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, masih terdapat kekurangan data pendukung diantaranya **peta wilayah** yang ditandatangani bersama antara kabupaten induk dengan kabupaten yang berbatasan secara langsung (peta terlampir).
3. Diharapkan kepada Bapak dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan penandatanganan peta wilayah dimaksud dengan kabupaten yang berbatasan secara langsung di wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Riau antara lain:
 - a. Kabupaten Kepulauan Meranti
 - b. Kabupaten Pelalawan
 - c. Kabupaten Indragiri Hilir

Demikian disampaikan, atas bantuan dan dukungan yang diberikan diucapkan terima kasih.

A.n GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIS DAERAH

u.b

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, *l*



Dra. Hj. RENI YUSNELI, M.TP

Pembina Utama Muda

NIP.19630410 198303 2 016

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Batas dan Wilayah di Jakarta;
2. Bupati Karimun di Tanjung Balai Karimun;
3. Bupati Meranti di Selat Panjang;
4. Bupati Pelalawan di Kerinci;
5. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan;

6. Ketua Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) di Tanjung Batu.





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Gedung A - Pulau Dompok

TANJUNGPINANG

Kode Pos : 29113

Nomor : 005/050/SET
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **UNDANGAN**

Tanjungpinang, 21 Februari 2014

Kepada :

Yth. **Ketua BP2K3**

di-

Tanjung Batu

Dengan hormat,

Sehubungan dengan usulan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kundur dan dalam rangka fasilitasi kelengkapan administrasi, bersama ini diharapkan kehadiran Saudara pada :

Hari / Tanggal : Senin / 24 Februari 2014

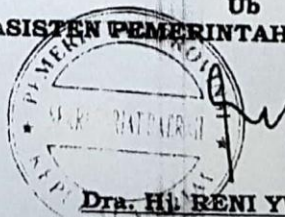
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Setda Lt. III - Pulau Dompok

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

An. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIS DAERAH,
Ub

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,



Dra. H. RENI YUSNELI, MTP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630410 198503 2 016

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang (sebagai laporan).



Scanned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 781 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU (DOB)
KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 28/DPRD/XII/ 2012 Tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan DPRD terhadap usulan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan rentang kendali kepada masyarakat serta berdasarkan pemenuhan terhadap persyaratan administrasi terhadap usulan Kabupaten Kepulauan Kundur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimur Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambah Lembaran Negara Republik Indenesia 4880);



Scanned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);



Scanned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H. M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kundur.
- KEDUA** : Menyetujui lokasi Ibu Kota Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kundur yaitu di Kecamatan Kundur.
- KETIGA** : Menyetujui cakupan wilayah Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kundur yaitu Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Durai, Kecamatan Ungar, Kecamatan Belat dan Kecamatan Moro.
- KEEMPAT** : Menyetujui pemberian hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kundur selama 2 tahun anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) per tahun.
- KELIMA** : Menyetujui dukungan dana untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pertama kali Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kundur sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 28 DESEMBER 2012

2 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Salinan

- : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Ketua DPR RI di Jakarta;
 3. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
 4. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta;
 5. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 6. Sekretaris Jenderal Kemendagri RI di Jakarta;
 7. Inspektur Jenderal Kemendagri RI di Jakarta;
 8. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI di Jakarta;
 9. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri RI di Jakarta;
 10. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 11. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 12. Bupati Karimun di Tanjung Balai Karimun;
 13. Ketua DPRD Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun;
 14. Ketua Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) di Tanjung Balai Karimun.



1468

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 12 April 2013

Nomor : 087/KDhKepri.135/4.13
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kundur**

Kepada Yth :
Bpk. **MENTERI DALAM NEGERI RI**

di - **JAKARTA**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami terdahulu Nomor 004/125/Admpum/I/2013 tanggal 4 Januari 2013 perihal Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kundur, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut :

1. Saat ini berkembang aspirasi masyarakat Kepulauan Kundur yang merupakan bahagian dari Kabupaten Karimun untuk melakukan pemekaran dalam rangka memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat serta untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Bahwa wilayah administrasi yang masuk ke dalam cakupan usulan Kabupaten Kepulauan Kundur meliputi Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Durai, Kecamatan Ungar dan Kecamatan Belat.
3. Sedangkan wilayah administrasi Kabupaten Karimun sebagai kabupaten induk meliputi Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral, Kecamatan Tebing, Kecamatan Buru, Kecamatan Moro dan Kecamatan Meral Barat.

Demikian kami sampaikan, mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut dari Bapak. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

MUHAMMAD SANI

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPR Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPD Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Bupati Karimun di Tanjung Balai Karimun;
5. Ketua DPRD Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun;
6. Ketua BP2K3 di Tanjung Balai Karimun;
7. Arsip.



Scanned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 424 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 781 TAHUN 2012 TENTANG PERSETUJUAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU (DOB) KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Karimun Nomor 100/PEM/190/X/2012, Tanggal 14 November 2012, Perihal SK Persetujuan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kundur;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan rentang kendali kepada masyarakat serta berdasarkan pemenuhan terhadap persyaratan administrasi, teknis dan fisik kewilayahan maka Kabupaten Karimun memenuhi syarat untuk dimekarkan dengan membentuk Daerah Otonom Baru Kabupaten Kepulauan Kundur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,



Scanned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



Scanned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H. M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kundur.
- KEDUA** : Menyetujui lokasi Ibu Kota Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kundur yaitu di Kecamatan Kundur.
- KETIGA** : Menyetujui cakupan wilayah Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kundur yaitu Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Durai, Kecamatan Ungar dan Kecamatan Belat.
- KEEMPAT** : Menyetujui pemberian hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kundur selama 2 (dua) tahun anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) per tahun.
- KELIMA** : Menyetujui dukungan dana untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pertama kali Daerah Otonomi Daerah (DOB)

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kepulauan Kundur sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 11 APRIL 2013



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPR RI di Jakarta;
3. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Sekretaris Jenderal Kemendagri RI di Jakarta;
7. Inspektur Jenderal Kemendagri RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri RI di Jakarta;
10. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
11. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
12. Bupati Karimun di Tanjung Balai Karimun;
13. Ketua DPRD Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun;
14. Ketua Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) di Tanjung Balai Karimun.



GOVERNOR OF KEPULAUAN RIAU

Nomor : 125/KDhKepri.135.5/5.12
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur

Tanjungpinang, 22 Mei 2012

Kepada Yth. :
Bupati Karimun
di -

TANJUNG BALAI KARIMUN

With respect,

Continuing the Letter of Bupati Karimun Number : 100/Pem/IV/59/2012 dated 30 April 2012 regarding as above, can be conveyed to you as follows :

1. That based on the Law Number 32 Year 2004 Regarding Regional Government, the formation of the region on its basis is intended to improve public service to accelerate the welfare of the community.
2. Referring to the Regulation of the Government Number 78 Year 2007 Regarding the System of Formation, Elimination and Merging of Regions and in the formation of the new Region Kabupaten Baru to meet the requirements administratively, technically and physically.
3. That in principle the Government of Kepulauan Riau supports and gives recommendations regarding the formation of Kabupaten Kepulauan Kundur with attention to the following :
 - To immediately meet the requirements of Administration, Technical and Physical Region through the stages of referring to the Regulation of the Government that is in effect.
 - To conduct a study of the potential of the region that gives an overview of the ability of the new region with the involvement of the experts.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



COPIES, conveyed to Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun;
4. Ketua Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.



Scanned with
CamScanner



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Jl. Adi Sucipto KM. 11 Telp 0771 – 442777, Fax 0771 – 442555

TANJUNGPINANG

Kode Pos : 29125

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 28 /Kpts-DPRD/160/XII/2012

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PEMBENTUKAN
KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah yang efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat program pembangunan secara merata dan menyeluruh, maka daerah dapat mengusulkan pemekaran dan pembentukan daerah baru sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - bahwa dengan memperhatikan Aspirasi sebagian besar masyarakat, Keputusan DPRD Kabupaten Karimun dan Keputusan Bupati Karimun tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Karimun atas Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur, maka DPRD Provinsi Kepulauan Riau memandang patut untuk menindaklanjuti usulan tersebut dalam bentuk Persetujuan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah berkali-kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan



Scanned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5043)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. 82, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5234)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22)
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.21-599 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.21 - 724 Tahun 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 694)

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3405/SJ tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2009-2014;
2. Peraturan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Scanned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 01/Kpts-DPRD/160/IX/2009 tentang Penetapan Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2009-2014;
4. Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 02/Kpts-DPRD/160/IX/2009 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Masa Jabatan 2009-2014;
5. Paripurna Ke - 21 DPRD Provinsi Kepulauan Riau tanggal 26 Desember 2012 tentang Persetujuan terhadap usulan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Karimun terhadap Usulan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.
7. Keputusan Bupati Karimun Nomor 199 Tahun 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Kepulauan Kundur tanggal 14 November 2012.
8. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 125/KDhKepri.135.5/5.12 tanggal 22 Mei 2012 tentang Rekomendasi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur.
9. Aspirasi sebagian besar masyarakat Kabupaten Karimun khususnya pada daerah usulan pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur melalui surat Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) Nomor 21/BP2K3/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Permohonan Persetujuan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur disertai dokumen pendukung secara administrasi, teknis dan fisik kewilayahan.
10. Surat Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau tentang Rekomendasi terhadap Usulan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur;

Mendengarkan : 1. Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang mendukung dan menyetujui terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur yang disampaikan pada Paripurna ke 21 tanggal 26 Desember 2012;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Menyetujui Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur yang merupakan Pemekaran dari Kabupaten Karimun terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Durai, Kecamatan Ungar, Kecamatan Belat dan Kecamatan Moro;

KEDUA : Menyetujui usulan atas penetapan Kecamatan Kundur sebagai calon Ibukota Kabupaten Kepulauan Kundur;



Scanned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- KETIGA** : Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan dokumen sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan fisik kewilayahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, antara lain : Dokumen aspirasi masyarakat, Hasil Kajian Daerah, Peta Wilayah Kabupaten Kepulauan Kundur, Keputusan Bupati Karimun, Keputusan DPRD Kabupaten Karimun, Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 26 Desember 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KETUA,


Ir. H. M. NURSYAFRIADI, M.Si

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Bupati Karimun di Tanjung Balai Karimun;
5. Ketua DPRD Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun;
6. Ketua-Ketua Komisi DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
7. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
10. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
11. Ketua Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur;
12. Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau



Scanned with
CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Desember 2013

Nomor : R-56/Pres/12/2013
Sifat : Sangat segera
Hal : 65 (enam puluh lima)
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang
Pembentukan
Provinsi/Kabupaten/Kota

Kepada Yth.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

di
Jakarta

Menunjuk surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor LG/11230/DPR R/IX/2013 tanggal 29 Oktober 2013 hal penyampaian 65 (enam puluh lima) RUU tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota, yaitu:

1. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran di Provinsi Sumatera Utara;
2. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pantal Barat Mandailing di Provinsi Sumatera Utara;
3. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Renah Indojat di Provinsi Sumatera Barat;
4. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Muara Bungo di Provinsi Jambi;
5. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pantal Timur di Provinsi Sumatera Selatan;
6. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kikim Area di Provinsi Sumatera Selatan;
7. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Lebak di Provinsi Bengkulu;
8. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur di Provinsi Kepulauan Riau;
9. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Bogor Barat di Provinsi Jawa Barat;
10. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara di Provinsi Jawa Barat;
11. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Garut Selatan di Provinsi Jawa Barat;
12. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Adonara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. RUU tentang Pembentukan Kota Maumere di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
15. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Sokayam Raya di Provinsi Kalimantan Barat;
16. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Banua Landjak di Provinsi Kalimantan Barat;
17. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Paser Selatan di Provinsi Kalimantan Timur;
18. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Berau Paser Selatan di Provinsi Kalimantan Timur;
19. RUU tentang Pembentukan Kota Langowan di Provinsi Sulawesi Utara;
20. RUU tentang Pembentukan Kota Tahuna di Provinsi Sulawesi Utara;
21. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Talaud Selatan di Provinsi Sulawesi Utara;
22. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Bone Selatan di Provinsi Sulawesi Selatan;
23. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Boliyohuto di Provinsi Gorontalo;
24. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Panipi di Provinsi Gorontalo;
25. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat di Provinsi Gorontalo;

26. RUU ...



Scanned with
CamScanner

24/12/2013 17:36

021 0000000

XXXXXXXXXX

PAGE 83



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

dengan ini kami menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ~~baik secara~~ sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili kami dalam membahas RUU tersebut.

Kami mengharapkan Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat melakukan pengkajian secara tajam dan mendalam terhadap setiap RUU tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan memberikan prioritas kepada pembahasan 4 (empat) RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru terlebih dahulu yang merupakan sisa dari 19 (sembilan belas) RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru, yaitu:

1. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. RUU tentang Pembentukan Kota Raha di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara;

yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 17 April 2012.

Selanjutnya kami juga mengharapkan agar pembahasan RUU tersebut dapat dipastikan tidak mengganggu jadwal dan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014 yang telah berjalan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

[Signature]

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Tembusan:

1. Wakil Presiden RI
2. Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
5. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
6. Menteri Dalam Negeri
7. Menteri Keuangan
8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 - 8 Jakarta 10110

TANDA TERIMA

TELAH DITERIMA BERKAS USULAN YAITU :

1. SURAT GUBERNUR KEPRI DITUJUKAN KEPADA MENDAGRI No. 087/KDHKEPRI.135/4.13 TANGGAL 12 APRIL 2013 PERIHAL USULAN PEMBENTUKAN DOB KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR
2. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPRI NO. 781 THN 2012 TTG PERSETUJUAN PEMBENTUKAN DOB KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR
3. KEPUTUSAN DPRD PROVINSI KEPRI NO. 28/KPTS-DPRD/160/XII/2012 TTG PERSETUJUAN TERHADAP PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR.
4. SURAT BUPATI KARIMUN DITUJUKAN KEPADA GUBERNUR PROV. KEPRI NO. 100/PEM/190/XI/2012 PERIHAL PENYAMPAIAN SK PERSETUJUAN DOB KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR.
5. KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN NO. 199 THN 2012 TTG PERSETUJUAN PEMBENTUKAN DOB KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR.
6. SURAT BUPATI KARIMUN DITUJUKAN KEPADA GUBERNUR KEPRI NO. 100/PEM/IV/59/2012 PERIHAL REKOMENDASI PEMEKARAN KAB. KEPULAUAN KUNDUR.
7. SURAT BADAN PEKERJA PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR (BP2K3) DITUJUKAN KEPADA MENDAGRI PERIHAL PENEGASAN USULAN PEMEKARAN KAB. KEPULAUAN KUNDUR.
8. BUKU KAJIAN AKADEMIK OLEH GERAKAN MUDA BADAN PEKERJA PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR BEKERJASAMA DENGAN PUSAT STUDI LOKAL DAN PEMBANGUNAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI THN 2012
9. BUKU KAJIAN AKADEMIS PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH CALON KAB. KEPULAUAN KUNDUR OLEH TIM PENELITI IPDN KERJASAMA PEMDA KAB. KARIMUN DENGAN LEMBAGA PENELITIAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI, KEMDAGRI THN 2013.
10. BUKU USULAN PEMEKARAN KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR.

14 Peta Wilayah Kabupaten Kepulauan Karimun (belum selesai/tanda tangan)
Demikian Tanda Terima ini dibuat untuk keperluan kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan dalam rangka pembentukan Kabupaten Kepulauan Kunder, pemekaran dari Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Jakarta, 9 Januari 2014

Yang menyerahkan
Karo/Kabag/Kasubag/Staf

(M. Usman, S.Sos, M.Si)
(M. Usman, S.Sos, M.Si)

Yang menerima
Kasi Wilayah IIA, Subdit Penataan Drh Wil. II
Ditjen Otda, Kemendagri

(M. Usman, S.Sos, M.Si)
(M. USMAN, S.Sos, M.Si)



Scanned with
CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (6) Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan dana percepatan di luar DAU dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Daerah provinsi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VI PENATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah.
- (2) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
 - e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan
 - f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.
- (3) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah.
- (4) Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional.

Bagian . . .



Scanned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Bagian Kedua Pembentukan Daerah

Pasal 32

- (1) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa:
 - a. pemekaran Daerah; dan
 - b. penggabungan Daerah.
- (2) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembentukan Daerah provinsi dan pembentukan Daerah kabupaten/kota.

Paragraf 1 Pemekaran Daerah

Pasal 33

- (1) Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru; atau
 - b. penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru.
- (2) Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota.
- (3) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

Pasal 34

- (1) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi:
 - a. persyaratan dasar kewilayahan; dan
 - b. persyaratan dasar kapasitas Daerah.
- (2) Persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. luas wilayah minimal;
 - b. jumlah penduduk minimal;

c. batas . . .



Scanned with
CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- c. batas wilayah;
 - d. Cakupan Wilayah; dan
 - e. batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan.
- (3) Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kemampuan Daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 35

- (1) Luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.
- (2) Ketentuan mengenai pengelompokan pulau atau kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar.
- (4) Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. paling sedikit 5 (lima) Daerah kabupaten/kota untuk pembentukan Daerah provinsi;
 - b. paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kabupaten; dan
 - c. paling sedikit 4 (empat) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kota.
- (5) Cakupan Wilayah untuk Daerah Persiapan yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau memuat Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rincian nama pulau yang berada dalam wilayahnya.
- (6) Batas usia minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. batas usia minimal Daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan Daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan; dan
 - b. batas usia minimal Kecamatan yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.

Pasal 36 . . .



Scanned with
CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 36

- (1) Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) didasarkan pada parameter:
 - a. geografi;
 - b. demografi;
 - c. keamanan;
 - d. sosial politik, adat, dan tradisi;
 - e. potensi ekonomi ;
 - f. keuangan Daerah; dan
 - g. kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Parameter geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lokasi ibu kota;
 - b. hidrografi; dan
 - c. kerawanan bencana.
- (3) Parameter demografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kualitas sumber daya manusia; dan
 - b. distribusi penduduk.
- (4) Parameter keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tindakan kriminal umum; dan
 - b. konflik sosial.
- (5) Parameter sosial politik, adat, dan tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum;
 - b. kohesivitas sosial; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan.
- (6) Parameter potensi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. potensi unggulan Daerah.
- (7) Parameter keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. kapasitas pendapatan asli Daerah induk;
 - b. potensi pendapatan asli calon Daerah Persiapan; dan
 - c. pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (8) Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan;
 - b. aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan;

c. aksesibilitas . . .



Scanned with
CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- c. aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur;
- d. jumlah pegawai aparatur sipil negara di Daerah induk; dan
- e. rancangan rencana tata ruang wilayah Daerah Persiapan.

Pasal 37

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

- a. untuk Daerah provinsi meliputi:
 - 1. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan provinsi; dan
 - 2. persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur Daerah provinsi induk.
- b. untuk Daerah kabupaten/kota meliputi:
 - 1. keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota;
 - 2. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah induk; dan
 - 3. persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Pasal 38

- (1) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

(4) Dalam . . .



Scanned with
CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 78 Tahun 2007
TANGGAL : 10 Desember 2007

PENILAIAN SYARAT TEKNIS

I. FAKTOR DAN INDIKATOR DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU

FAKTOR	INDIKATOR
1. Kependudukan	1. Jumlah penduduk. 2. Kepadatan penduduk.
2. Kemampuan Ekonomi	3. PDRB non migas perkapita. 4. Pertumbuhan ekonomi. 5. Kontribusi PDRB non migas.
3. Potensi daerah	6. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk. 7. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk. 8. Rasio pasar per 10.000 penduduk 9. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD. 10. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP. 11. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA. 12. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk. 13. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk.

14. Persentase . . .



Scanned with
CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

FAKTOR	INDIKATOR
	<p>14. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor.</p> <p>15. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga.</p> <p>16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor.</p> <p>17. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas.</p> <p>18. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas.</p> <p>19. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk.</p>
4. Kemampuan Keuangan	<p>20. Jumlah PDS.</p> <p>21. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk.</p> <p>22. Rasio PDS terhadap PDRB non migas.</p>
5. Sosial Budaya	<p>23. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk.</p> <p>24. Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk.</p> <p>25. Jumlah balai pertemuan.</p>
6. Sosial Politik	<p>26. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih.</p> <p>27. Jumlah organisasi kemasyarakatan.</p>
7. Luas Daerah	<p>28. Luas wilayah keseluruhan.</p> <p>29. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.</p>

8. Pertahanan . . .



Scanned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

FAKTOR	INDIKATOR
8. Pertahanan	30. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah. 31. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan.
9. Keamanan	32. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk.
10. Tingkat Kesejahteraan masyarakat	33. Indeks Pembangunan Manusia.
11. Rentang Kendali	34. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota). 35. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota).

II. DEFINISI INDIKATOR

1. Indikator:

Suatu parameter atau suatu nilai yang diturunkan dari faktor yang memberikan informasi tentang keadaan dari suatu fenomena/lingkungan/wilayah, dengan signifikansi dari indikator tersebut berhubungan secara langsung dengan nilai parameter. Indikator ini dihitung untuk penyusunan indeks komposit pembentukan/penghapusan dan penggabungan daerah otonom harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : (1) data tersedia, (2) mudah dihitung, (3) relevan, (4) terukur, dan reliabel.

2. Jumlah penduduk:

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

3. Kepadatan penduduk:

Rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah efektif.

4. PDRB:

Jumlah nilai tambah bruto seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi/muncul di suatu daerah pada periode tertentu.

5. PDRB . . .



Scanned with
CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. PDRB non migas per kapita:
Nilai PDRB non migas atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk di suatu daerah.
6. Pertumbuhan Ekonomi:
Pertumbuhan nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan dari suatu periode/tahun terhadap periode/tahun sebelumnya.
7. Kontribusi PDRB non migas:
Persentase PDRB non migas kabupaten/kota terhadap PDRB non migas provinsi dan atau persentase PDRB non migas provinsi terhadap PDB nasional.
8. Potensi Daerah:
Potensi fisik dan non fisik dari suatu daerah/wilayah seperti penduduk, sumber daya buatan dan sumber daya sosial.
Untuk keperluan otonomi daerah, potensi daerah yang dapat diukur saja (tangible) dimasukkan dalam indikator tersedia.
9. Bank:
Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
10. Lembaga Keuangan Non Bank:
Badan usaha selain bank, meliputi asuransi, pegadaian, dan koperasi.
11. Kelompok Pertokoan:
Sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko dan mengelompok. Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu.
12. Pasar:
Prasarana fisik yang khusus dibangun untuk tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa, biasanya aktivitasnya rutin dilakukan setiap hari.
13. Fasilitas Kesehatan:
Tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan, berada di bawah pengawasan dokter/tenaga medis, yang biasanya dilengkapi dengan fasilitas rawat inap, dan klinik.

14. Tenaga . . .



Scanned with
CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

14. Tenaga medis:
Dokter, mantri kesehatan/perawat, dan sejenisnya, tidak termasuk bidan, yang dapat memberikan pengobatan baik yang buka praktek maupun tidak.
15. Kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor:
Alat untuk mengangkut orang seperti bemo, bajaj dan motor, mobil, perahu/jukung baik yang menggunakan tenaga penggerak motor tempel atau tidak. Perahu motor menggunakan motor penggerak dipasang tidak permanen maupun kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak, motor dipasang secara permanen di dalamnya.
16. Pelanggan listrik:
Rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan non PLN sebagai alat penerangan rumah.
17. Pengguna air bersih:
Rumah tangga yang menggunakan air bersih, khususnya untuk kebutuhan air minum.
18. Pendapatan Daerah Sendiri:
Seluruh penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam dan penerimaan dari bagi hasil provinsi (untuk pembentukan kabupaten/kota).
19. Sarana Peribadatan:
Bangunan yang digunakan sebagai tempat melakukan peribadatan sesuai dengan agama yang dianut.
20. Fasilitas lapangan olah raga:
Tempat (fasilitas) yang digunakan untuk melakukan aktivitas olah raga baik di ruangan terbuka maupun ruangan tertutup (seperti lapangan sepak bola, bola voli, bulu tangkis dan kolam renang).
21. Balai Pertemuan:
Tempat (gedung) yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial.
22. Penduduk yang ikut Pemilu:
Penduduk yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan UU Pemilu.

23. Organisasi . . .



Scanned with
CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

23. Organisasi Kemasyarakatan:

Organisasi masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial dan kemasyarakatan.

24. Luas Daerah/Wilayah Keseluruhan:

Luas daratan ditambah luas 4 mil laut dari pantai untuk kabupaten/kota atau 4 sampai dengan 12 mil laut dari pantai untuk provinsi.

25. Wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan:

Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budi daya di luar kawasan lindung.

26. Personil Aparat Pertahanan:

Aparat pertahanan adalah anggota TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU yang menjadi anggota satuan organik TNI di wilayah calon daerah otonom.

27. Karakteristik Wilayah:

Adalah ciri wilayah yang ditunjukkan oleh hamparan permukaan fisik calon daerah otonom (berupa daratan, atau daratan dan pantai/laut, atau kepulauan), dan posisi calon daerah otonom (berbatasan dengan negara lain atau tidak berbatasan dengan negara lain).

28. Rentang kendali:

Jarak rata-rata kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten), dan rata-rata lama waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten).

29. Indeks Pembangunan Manusia:

Merupakan indeks komposit yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk melihat taraf hidup (kemajuan) masyarakat.

III. CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR

1. Jumlah Penduduk:

Semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.

2. Kepadatan Penduduk:

Jumlah penduduk dibagi luas wilayah efektif.

3. PDRB . . .



Scanned with
CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

3. PDRB non migas perkapita:
Nilai PDRB non migas atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk.
4. Pertumbuhan ekonomi:
Nilai besaran PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke-t dikurangi nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke t-1 dibagi nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke t-1 dikalikan 100.
5. Kontribusi PDRB non migas:
Untuk provinsi adalah nilai PDRB non migas provinsi atas dasar harga berlaku suatu daerah dibagi PDRB non migas nasional atas dasar harga berlaku dikalikan 100.
Untuk kabupaten/kota adalah nilai PDRB non migas kabupaten atas dasar harga berlaku suatu daerah dibagi PDRB non migas provinsi atas dasar harga berlaku dikalikan 100.
6. Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank per 10.000 penduduk:
Jumlah Bank dan Non Bank dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
7. Rasio kelompok pertokoan/toko per 10.000 penduduk:
Jumlah kelompok pertokoan/toko dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
8. Rasio Pasar per 10.000 penduduk:
Jumlah pasar dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
9. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD:
Jumlah sekolah SD dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
10. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP:
Jumlah sekolah SLTP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun.
11. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA:
Jumlah sekolah SLTA dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun.
12. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk:
Jumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik baik negeri maupun swasta dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

13. Rasio . . .



Scanned with
CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

13. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk:
Jumlah dokter, perawat, dan mantri kesehatan dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
14. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor:
Jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100.
15. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga:
Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan Non PLN dibagi jumlah rumah tangga dikali 100.
16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor:
Jumlah panjang jalan dibagi jumlah kendaraan bermotor.
17. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas:
Jumlah pekerja yang berpendidikan SLTA dibagi jumlah penduduk usia 18 tahun dikali 100.
18. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas:
Jumlah pekerja yang berpendidikan S-1 dibagi jumlah penduduk usia 25 tahun dikali 100.
19. Rasio Pegawai Negeri Sipil terhadap 10.000 penduduk:
Jumlah PNS Gol I/II/III/IV dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000.
20. Jumlah Pendapatan Daerah Sendiri (PDS):
Seluruh penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam dan penerimaan dari bagi hasil provinsi (untuk pembentukan kabupaten/kota).
21. Jumlah penerimaan PDS terhadap Jumlah Penduduk:
Jumlah penerimaan PDS dibagi dengan jumlah penduduk.
22. Jumlah penerimaan PDS terhadap PDRB non migas:
Jumlah penerimaan PDS dibagi dengan jumlah PDRB non migas.

23. Rasio . . .



Scanned with
CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

23. Rasio sarana Peribadatan per 10.000 penduduk:
Jumlah masjid, gereja, pura, vihara dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
24. Rasio fasilitas lapangan olah raga per 10.000 penduduk:
Jumlah lapangan bulu tangkis, sepak bola, bola volly, dan kolam renang dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
25. Jumlah Balai Pertemuan:
Jumlah gedung yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial.
26. Rasio Penduduk yang ikut Pemilu legislatif terhadap Penduduk yang mempunyai hak pilih:
Jumlah penduduk usia yang mencoblos saat pemilu legislatif dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau sudah kawin.
27. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan:
Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar.
28. Luas wilayah keseluruhan:
Jumlah luas daratan ditambah luas lautan.
29. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan:
Jumlah luas wilayah yang dapat digunakan untuk permukiman dan industri.
30. Rasio jumlah Personil Aparat pertahanan terhadap luas wilayah:
Jumlah personil aparat pertahanan dibandingkan dengan luas wilayah.
31. Karakteristik Wilayah:
Ciri wilayah yang ditinjau dari sudut pandang pertahanan, pemberian nilai tergantung kepada hamparan fisik dan posisi calon daerah otonom. Tingkatan penilaian calon daerah otonom dimulai dari nilai tertinggi dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa kepulauan.
 - b. Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa daratan dan pantai.
 - c. Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa daratan.

d. Tidak . . .



Scanned with
CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

d. Tidak berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa kepulauan, daratan dan pantai, atau daratan.

32. Rasio personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk:

Jumlah personil aparat keamanan dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

33. Indeks Pembangunan Manusia:

Dengan melihat tiga aspek kehidupan manusia, yaitu: usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent living*). Usia hidup diukur dengan AHH (Angka Harapan Hidup) yang secara teknis dihitung dengan metode tidak langsung berdasarkan rata-rata Anak Lahir Hidup (ALH) dan rata-rata anak yang masih hidup.

Pengetahuan diukur dengan Angka Melek Huruf (AMH) dan RLS (Rata-rata Lama Sekolah) dari penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH dihitung dari kemampuan membaca dan menulis, sedangkan RLS dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan yakni jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki dan tingkat/kelas yang pernah/sedang diduduki. Standar layak hidup diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan.

34. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten):

Jumlah jarak dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten) dibagi jumlah kabupaten/kota atau kecamatan.

35. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan:

Jumlah waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota) dibagi jumlah kabupaten/kota atau kecamatan.

IV. METODE PENILAIAN

1. Penilaian yang digunakan adalah sistem skoring, untuk pembentukan daerah otonom baru terdiri dari 2 macam metode yaitu: (1) Metode Rata-rata, dan (2) Metode Kuota.
2. Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon daerah dan daerah induk terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan daerah di sekitarnya.

3. Metode . . .



Scanned with
CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

3. Metode Kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon daerah maupun daerah induk.

Kuota jumlah penduduk provinsi untuk pembentukan provinsi adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi-provinsi sekitarnya.

Kuota jumlah penduduk kabupaten untuk pembentukan kabupaten adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan seluruh kabupaten di provinsi yang bersangkutan.

Kuota jumlah penduduk kota untuk pembentukan kota adalah 4 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan kota-kota di provinsi yang bersangkutan dan sekitarnya.

Semakin besar perolehan besaran/nilai calon daerah dan daerah induk (apabila dimekarkan) terhadap kuota pembentukan daerah, maka semakin besar skornya.
4. Dalam hal terdapat beberapa faktor yang memiliki karakteristik tersendiri maka penilaian teknis dimaksud dilengkapi dengan penilaian secara kualitatif.
5. Pemberian skor untuk pembentukan provinsi menggunakan Pembanding Provinsi, pembentukan kabupaten menggunakan Pembanding Kabupaten dan pembentukan kota menggunakan Pembanding Kota.
6. Pembanding Provinsi adalah provinsi-provinsi sesuai dengan letak geografis, yaitu:
 - a. Jawa dan Bali;
 - b. Sumatera;
 - c. Sulawesi;
 - d. Kalimantan;
 - e. Nusa Tenggara;
 - f. Maluku; dan
 - g. Papua.
7. Pembanding Kabupaten adalah kabupaten-kabupaten di provinsi yang bersangkutan.
8. Pembanding Kota adalah kota-kota sejenis (tidak termasuk kota yang menjadi ibukota provinsi) di provinsi yang bersangkutan dan atau provinsi di sekitarnya minimal 3 (tiga) kota.
9. Dalam hal menentukan pembanding provinsi, pembanding kabupaten dan pembanding kota terdapat provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki besaran/nilai indikator yang sangat berbeda (di atas 5 kali

dari . . .



Scanned with
CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

dari besaran/nilai terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan.

10. Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5, dimana skor 5 masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 kategori kurang mampu, skor 2 kategori tidak mampu dan skor 1 kategori sangat tidak mampu.
11. Besaran/nilai rata-rata pembandingan dan besaran jumlah kuota sebagai dasar untuk pemberian skor. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata.

V. PEMBOBOTAN

Setiap faktor dan indikator mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan daerah otonom.

1. Bobot untuk masing-masing faktor dan indikator:

NO	FAKTOR DAN INDIKATOR	BOBOT
1	Kependudukan	20
	1. Jumlah penduduk	15
	2. Kepadatan penduduk	5
2	Kemampuan Ekonomi	15
	1. PDRB non migas perkapita	5
	2. Pertumbuhan ekonomi	5
	3. Kontribusi PDRB non migas	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	FAKTOR DAN INDIKATOR	BOBOT
3	Potensi Daerah	15
	1. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk	2
	2. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk	1
	3. Rasio Pasar per 10.000 penduduk	1
	4. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	1
	5. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	1
	6. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	1
	7. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk	1
	8. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	1
	9. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor	1
	10. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	1
	11. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	1
	12. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas	1
	13. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas	1

14. Rasio . . .



Scanned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	FAKTOR DAN INDIKATOR	BOBOT
	14. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk	1
4	Kemampuan Keuangan	15
	1. Jumlah PDS	5
	2. Rasio PDS terhadap Jumlah Penduduk	5
	3. Rasio PDS terhadap PDRB	5
5	Sosial Budaya	5
	1. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	2
	2. Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk	2
	3. Jumlah balai pertemuan	1
6	Sosial Politik	5
	1. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih	3
	2. Jumlah organisasi kemasyarakatan	2
7	Luas Daerah	5
	1. Luas wilayah keseluruhan	2
	2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	3
8	Pertahanan	5
	1. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	3
	2. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan	2

9 Keamanan . . .



Scanned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	FAKTOR DAN INDIKATOR	BOBOT
9	Keamanan	5
	1. Rasio jumlah personil aparat Keamanan terhadap jumlah penduduk	5
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	5
	1. Indeks Pembangunan Manusia	5
11	Rentang Kendali	5
	1. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten)	2
	2. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten)	3
Total		100

2. Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator. Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori:

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator			Keterangan
Sangat Mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260	s/d	339	Ditolak
Tidak mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100	s/d	179	Ditolak

3. Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419) serta perolehan total nilai indikator faktor kependudukan (80-100), faktor kemampuan

ekonomi . . .



Scanned with
CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

ekonomi (60-75), faktor potensi daerah (60-75) dan faktor kemampuan keuangan (60-75).

4. Usulan pembentukan daerah otonom baru ditolak apabila calon daerah otonom atau daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu, tidak mampu dan sangat tidak mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah, atau perolehan total nilai indikator faktor kependudukan kurang dari 80 atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau faktor potensi daerah kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Scanned with
CamScanner

[illegible]

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN TANJUNGBATU KOTA
KECAMATAN KUNDUR

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Pada hari ini **SENIN** tanggal **25** bulan JULI tahun DUA RIBU SEBELAS (**25 / 07/2011**) telah diadakan rapat Lembaga Pemberdayaan MAsyarakat (LPM) Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur, membuat pernyataan sebagai berikut :

1. Kami LPM Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur, telah memutuskan berdasarkan hasil rapat sesuai berita acara tanggal **21 / 07/2011** mendukung pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.
2. Kami LPM Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur, bersedia membantu dan mendukung proses pembentukan kabupaten Kepulauan Kundur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam fikiran sehat tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Yang membuat pernyataan,

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tanjungbatu Kota
Kecamatan Kundur
Ketua,



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BADAN PERMUSYAWATAN DESA (BPD)
DESA BATU LIMAU KECAMATAN KUNDUR**

Batu Limau Kec. Kundur Kab. Karimun

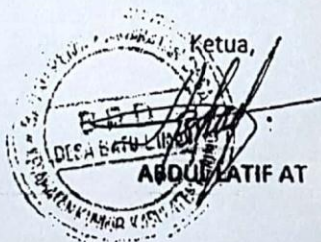
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Pada hari ini SELASA tanggal 16 bulan Agustus tahun Dua Ribu Sebelas (/ 08/2011) telah diadakan rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Batu Limau Kecamatan Kundur, membuat pernyataan sebagai berikut :

1. Kami BPD Desa Batu Limau Kecamatan Kundur telah memutuskan berdasarkan hasil rapat sesuai berita acara tanggal 16 / 08 / 2011 mendukung pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.
2. Kami BPD Desa Batu Limau Kecamatan Kundur bersedia membantu dan mendukung proses pembentukan kabupaten Kepulauan Kundur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam fikiran sehat tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Yang membuat pernyataan,





PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUNGAI UNGAR KEC. KUNDUR

Jl. Besar Sungai Ungar Kec. Kundur Kab. Karimun Kode Pos 29662

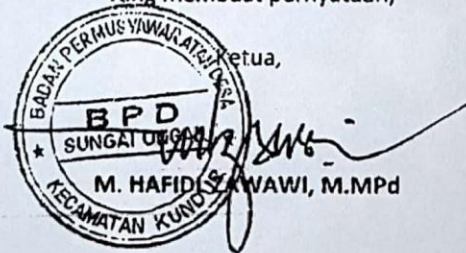
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan September tahun Dua Ribu Sebelas (28 / 09/2011) telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur, berdasarkan rapat tersebut kami membuat pernyataan sebagai berikut :

1. Kami BPD Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur telah memutuskan berdasarkan hasil rapat sesuai berita acara tanggal 28 / 09 / 2011 mendukung pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.
2. Kami BPD Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur bersedia membantu dan mendukung proses pembentukan kabupaten Kepulauan Kundur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam fikiran sehat tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Yang membuat pernyataan,



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SEI SEBESI KECAMATAN KUNDUR
KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sebelas (27/07/2011) telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur, membuat pernyataan sebagai berikut:

1. Kami BPD Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur, telah memutuskan berdasarkan hasil rapat sesuai berita acara tanggal 27/07/ 2011 mendukung pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.
2. Kami BPD Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur, bersedia membantu dan mendukung proses pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam pikiran sehat tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Yang membuat pernyataan,

Ketua,

BPD Desa Sungai Sebesi

ZULKARNAEN, S.Sos.I

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KANTOR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LUBUK KECAMATAN KUNDUR
Alamat : Jalan Besar Lubuk

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh satu bulan Juli tahun Dua ribu sebelas (20/07/2011) telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk, Kecamatan Kundur.

1. Kami BPD Desa Lubuk Kecamatan Kundur, telah memutuskan berdasarkan hasil rapat sesuai Berita Acara tanggal 21 / 07 / 2011 mendukung pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.
2. Kami BPD Desa Lubuk Kecamatan Kundur, bersedia membantu dan mendukung proses pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam fikiran sehat tanpa ada tekanan dari pihak mana pun, serta untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Yang membuat Pernyataan,

Ketua,
BPD Desa Lubuk

ABDUL GANI



Canned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SEMEMBANG
KECAMATAN DURAL

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Pada hari ini, Senin Tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua ribu sebelas telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa, Desa Semembang Kecamatan Dural Kabupaten Karimun membuat pernyataan sebagai berikut :

1. Kami BPD Desa Semembang kecamatan Dural Kabupaten Karimun telah memutuskan berdasar hasil rapat sesuai berita acara tanggal 01 Agustus 2011 mendukung pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.
2. Kami BPD Desa Semembang Kecamatan Dural Kabupaten Karimun bersedi membantu dan mendukung proses pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam fikiran sehat tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Yang Membuat Pernyataan



Scanned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
BADAN PEMUSYAWARAKATAN DESA (BPD)
DESA TANJUNG KILANG KECAMATAN DURAI
Sekretariat : Jln. Sersan Haji Salim Tanjung Kilang 29663

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Pada hari ini Rabu tanggal 27 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sebelas (27-07-2011) telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Kilang Kecamatan Durai, membuat pernyataan sebagai berikut:

1. Kami BPD Desa Tanjung Kilang Kecamatan Durai telah memutuskan berdasarkan hasil rapat sesuai berita acara tanggal 27 Juli 2011 mendukung pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.
2. Kami BPD Desa Tanjung Kilang Kecamatan Durai, bersedia membantu dan mendukung proses pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam pikiran sehat tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta untuk dapat dipergunakan semestinya.

Yang membuat pernyataan,

Ketua,

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Tanjung Kilang
Kecamatan Durai

ROS LI, S.Pi



Scanned with
CamScanner



BADAN PEMUSYAWARAKATAN DESA (BPD)
DESA SANGGAR KEC. DURAI KAB. KARIMUN

Alamat RT. 09 RW. 03 Tg. Perai Hp. 082171898008

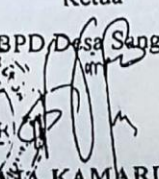
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli Dua Ribu Sebelas (27 / 07 / 2011) telah diadakan rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Desa Sanglar Kecamatan Durai, membuat pernyataan sebagai berikut :

1. Kami BPD Desa Sanglar Kecamatan Durai, telah memutuskan berdasarkan hasil rapat sesuai berita acara tanggal 27 / 07 / 2011 mendukung pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.
2. Kami BPD Desa Sanglar Kecamatan Durai, bersedia membantu dan mendukung proses pembentukan Kabupaten Kundur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam fikiran sehat tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Yang membuat pernyataan,

Ketua
 BPD Desa Sanglar

RASA KAMARUDIN



Scanned with
 CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN DURAI
BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)
Jalan. Kapten Muchtar Hp.081372248696

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Pada hari ini Sabtu tanggal 15 bulan 08 tahun (...../...../2011) telah diadakan rapat Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Durai Kecamatan Durai, membuat pernyataan sebagai berikut:

1. Kami BPD Desa Durai Kecamatan Durai, telah memutuskan berdasarkan hasil rapat sesuai berita acara tanggal 16 / 08 / 2011 mendukung pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.
2. Kami BPD Desa Durai Kecamatan Durai, bersedia membantu dan mendukung proses pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam pikiran sehat tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Yang membuat pernyataan,



Scanned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN SAWANG KECAMATAN KUNDUR BARAT
Alamat : Jalan Besar Sawang

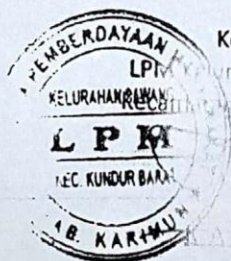
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu sebelas telah diadakan rapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat, membuat pernyataan sebagai berikut :

1. Kami LPM Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat, telah memutuskan berdasarkan hasil rapat sesuai berita acara tanggal 23 Agustus 2011 mendukung pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.
2. Kami LPM Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat, bersedia membantu dan mendukung proses pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam fikiran sehat tanpa ada tekanan dan pihak manapun, serta untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Yang membuat pernyataan



Ketua,
Kelurahan Sawang
Kundur Barat



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN KUNDUR BARAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

Jl. ABDUL HAMID No. * Kundur 29662
Telepon. Faks ...

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Pada hari ini senin tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu sebelas (12/09/2011) telah diadakan rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat, membuat pernyataan sebagai berikut :

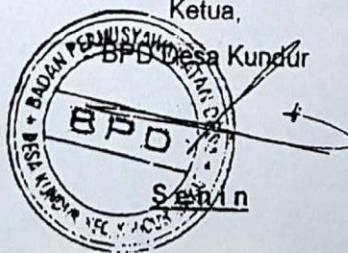
1. Kami BPD Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat ,telah memutuskan berdasarkan hasil rapat sesuai berita acara tanggal 12/09/2011 mendukung pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.
2. Kami BPD Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat, bersedia membantu dan mendukung proses pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam fikiran sehat tanpa ada tekanan dari pihak manapun,serta untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Yang membuat pernyataan,

Ketua,

BPD Desa Kundur



Senin



Scanned with
CamScanner



BADAN PERMUSYAWATAN DESA (BPD) DESA SAWANG SELATAN KECAMATAN KUNDUR BARAT

Jl. Km 14. Sawang Selatan Kec. Kundur Barat Kab. Karimun

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Pada hari ini SELASA tanggal DUA PULUH TIGA bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU SEBELAS (23/08/2011) telah diadakan rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat, membuat pernyataan sebagai berikut :

1. Kami BPD Desa Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat telah memutuskan berdasarkan hasil rapat sesuai berita acara tanggal 23 / 08 / 2011 mendukung pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.
2. Kami BPD Desa Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat bersedia membantu dan mendukung proses pembentukan kabupaten Kepulauan Kundur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam fikiran sehat tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Yang membuat pernyataan,



Scanned with
CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SAWANG LAUT**

Alamat : Jalan Besar Kobel Laut . 081372017910,085375107339

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Pada hari ini Selasa tanggal 12 bulan juli tahun 2011 (12/07/2011) telah diadakan rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sawang Laut Kecamatan Kundur Barat, membuat pernyataan sebagai berikut :

1. Kami BPD Desa Sawang Laut Kecamatan Kundur Barat , telah memutuskan berdasarkan hasil rapat sesuai berita acara tanggal 12 / 07 / 2011, mendukung Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.
2. Kami BPD Desa Sawang Laut Kecamatan Kundur Barat , bersedia membantu dan mendukung proses pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam fikiran sehat tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta untuk dapat di pergunakan dimana perlu.

Yang membuat pernyataan,

Badan Permasyarakatan Desa Sawang Laut

Ketua

{ BAMBANG RYANTO }



Scanned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN URUNG
KECAMATAN KUNDUR UTARA**

Sekretariat : Jl. Hangtuah Km.1 Tanjungberlian – Urung

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Pada hari ini *Senin* tanggal *Sepuluh* bulan *Oktober* tahun *Dua Ribu Sebelas*, telah diadakan Rapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Urung, dengan ini telah membuat pernyataan sebagai berikut :

1. Kami LPM Kelurahan Urung, telah memutuskan berdasarkan hasil rapat sesuai berita acara tanggal 08 Oktober 2011, *Mendukung pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.*
2. Kami LPM Kelurahan Urung, bersedia membantu dan mendukung proses pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam fikiran sehat tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungberlian, 08 Oktober 2011

Yang membuat pernyataan,
Ketua LPM Kelurahan Urung


HERI PURWANTO, SE



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TELUK RADANG
KECAMATAN KUNDUR UTARA**

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh September Dua Ribu Sebelas, telah di adakan rapat badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara, Membuat persyaratan sebagai berikut :

1. Kami BPD Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara, telah memutuskan berdasarkan hasil rapat sesuai berita acara Tanggal 20 Nofember 2011, Mendukung Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.
2. Kami BPD Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara, Bersedia membantu dan mendukung proses pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya dalam pikiran sehat tanpa ada tekanan dari pihak mana pun, serta untuk dapat di pergunakan di mana perlu.

Yang membuat Pernyataan,
Ketua
Desa Teluk Radang



Scanned with
CamScanner

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUNGAI UNGAR UTARA KECAMATAN KUNDUR UTARA
KABUPATEN KARIMUN**

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Pada hari ini Sabtu tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua ribu sebelas (10/09/2011) telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Ungar Utara Kecamatan Kundur Utara, membuat pernyataan sebagai berikut :

1. Kami BPD Desa Sungai Ungar Utara Kecamatan Kundur Utara telah memutuskan berdasarkan hasil rapat sesuai berita acara tanggal 10/09/2011 mendukung pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.
2. Kami BPD Desa Sungai Ungar Utara Kecamatan Kundur Utara, bersedia membantu dan mendukung proses pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sekenanya dalam pikiran sehat tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Yang membuat pernyataan,

Ketua
BPD Desa Sungai Ungar Utara

HASMI

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
URUNG BARAT**

Jalan Hang Tuah Desa Urung Barat Kode Pos 29662

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Pada hari ini Senin tanggal 18 Juli 2011 (12/07/2011) telah diadakan rapat Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara membuat pernyataan sebagai berikut:

1. Kami BPD Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara, Telah memutuskan Berdasarkan hasil rapat sesuai berita acara tanggal 18 / 07 / 2011, mendukung pembentukan Kabupaten Kepulauan kundur.
2. Kami BPD Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara, bersedia membantu dan mendukung proses pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam fikiran sehat, tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang membuat pernyataan

Badan Permusyawaratan Desa Urung Barat



Ries Alananto

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN TANJUNGBATU BARAT
KECAMATAN KUNDUR**

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Pada hari ini tanggal bulan September tahun Dua Ribu Sebelas (/09/2011) telah diadakan rapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tanjungbatu Barat Kecamatan Kundur tentang dukungan pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur, kami LPM Kelurahan Tanjungbatu Barat membuat pernyataan sebagai berikut :

1. Kami LPM Kelurahan Tanjungbatu Barat Kecamatan Kundur, telah memutuskan berdasarkan hasil rapat sesuai berita acara tanggal / 09/2011 mendukung pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.
2. Kami LPM Kelurahan Tanjungbatu Barat Kecamatan Kundur, bersedia membantu dan mendukung proses pembentukan kabupaten Kepulauan Kundur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam fikiran sehat tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Yang membuat pernyataan,

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Kelurahan Tanjungbatu Barat Kecamatan Kundur
Ketua,





**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN ALAI
KECAMATAN KUNDUR**

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Pada hari ini ~~JUMAT~~ tanggal ~~26/08/2011~~ bulan Agustus tahun DUA RIBU SEBELAS (26 / 08/2011) telah diadakan rapat Lembaga Pemberdayaan MAsyarakat (LPM) Kelurahan Alai Kecamatan Kundur, membuat pernyataan sebagai berikut :

1. Kami LPM Kelurahan Alai Kecamatan Kundur, telah memutuskan berdasarkan hasil rapat sesuai berita acara tanggal 26 / 08/2011 mendukung pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.
2. Kami LPM Kelurahan Alai Kecamatan Kundur, bersedia membantu dan mendukung proses pembentukan kabupaten Kepulauan Kundur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam fikiran sehat tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Yang membuat pernyataan,

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Alai
Kecamatan Kundur



Ketua,

A. KARIM NYAT

RIWAYAT HIDUP



HERRYZAL lahir di Sungai Ungar, Kecamatan Kundur pada tanggal 10 Mei 1996, sebagai anak pertama dari dua bersaudara dan adik (Nurbetty), dari pasangan Ayahanda **ABDUL RASYID** dan Ibunda **HALIZAH**. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 001 Kundur pada tahun 2009. Setelah itu, penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kundur pada tahun 2012 selama 3 tahun, selanjutnya pada tahun 2012 penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kundur pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Penulis dinyatakan “**LULUS**” pada tanggal 18 November 2019 dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dengan judul skripsi “ Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepulauan Kundur Terkendala Menjadi Daerah Otonom Baru” pada tahun 2019.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta D
1. Dilarang
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.